Laporan Survei

NILAI RAPOR

2 TAHUN KEBIJAKAN PRABOWO-GIBRAN DI MATA MAHASISWA

PSKP
Pusat Studi Kebijakan Publik

Laporan Survei

NILAI RAPOR

DUA TAHUN KEBIJAKAN PRABOWO-GIBRAN DI MATA MAHASISWA

Penulis

Hilma Fanniar Rohman
Fakhri Ilham Syarifudin
Ilham Jul Aiman
Hanif Amrin Rasyada

Mitra Bestari

Ahmad Norma Permata
Budi Asyhari

Desainer

Hanif Amrin Rasyada

Penerbit

PSKP UAD (Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Ahmad Dahlan)
Yogyakarta, Indonesia

Hak Cipta

©2026 Pusat Studi Kebijakan Publik
Universitas Ahmad Dahlan. Hak cipta publikasi ini, meliputi teks, analisis, logo, serta desain tata letak, dipegang penuh oleh PSKP UAD. Permohonan izin penggandaan sebagian atau seluruh isi publikasi dapat disampaikan melalui email ke pskp@uad.ac.id.

Kredit

Konten publikasi Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Ahmad Dahlan terbuka untuk dikutip secara bebas, selama mencantumkan kredit atau sumber rujukan secara jelas.

Foto: Pinterest

PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin. Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Ahmad Dahlan dapat menyelesaikan laporan riset nasional bertajuk "Evaluasi 2 Tahun Kebijakan Pemerintahan Prabowo–Gibran".

Pembangunan nasional yang inklusif membutuhkan kemitraan dan komunikasi berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat. Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, refleksi dan kajian akademis diperlukan untuk mengevaluasi capaian program prioritas nasional serta mengidentifikasi ruang perbaikan demi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Laporan ini menghimpun pandangan 828 mahasiswa dari 32 provinsi di Indonesia sebagai bagian dari masyarakat terdidik *(educated voters).* Persepsi mereka memberikan gambaran mengenai kebermanfaatan *(perceived benefit)* dan ketepatan sasaran 15 program unggulan pemerintah di mata generasi muda.

Temuan riset menunjukkan apresiasi terhadap program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus mencatat perlunya penguatan penyaluran dan pelaksanaan sejumlah program agar lebih optimal dan tepat sasaran.

Seluruh data dalam laporan ini mencerminkan respons peserta survei dan dihadirkan sebagai kontribusi akademis yang konstruktif untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada tim peneliti PSKP UAD, pimpinan Universitas Ahmad Dahlan, serta mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam survei ini. Semoga laporan ini memberikan manfaat dan masukan berharga bagi perumusan kebijakan publik di Indonesia.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat
Nashrun Minallah wa Fathun Qarieb
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, September 2026

Hilma Fanniar Rohman
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP)
Universitas Ahmad Dahlan

INDEKS

I Pengantar

II Indeks

III Latar Belakang

01 Urgensi Evaluasi Program Prioritas Prabowo-Gibran

04 Pertanyaan Studi

06 Catatan

07 Metodologi

10 Profil Demografi

18 Penilaian Kinerja Kabinet Prabowo-Gibran

21 Program Prioritas Prabowo-Gibran dan Manfaatnya

26 Program Prioritas Prabowo-Gibran Paling Tepat dan Tidak Tepat Sasaran

30 Program Makan Bergizi Gratis

32 Perbaikan Sekolah melalui Revitalisasi Satuan Pendidikan

34 Sekolah Nasional Terintegrasi setiap Kabupaten/Kota

36 Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda

38 Sekolah Rakyat

40 Cek Kesehatan Gratis

42 Koperasi Desa Merah Putih

44 Cetak Sawah Baru

46 Kemandirian Energi dan Air

48 Kampung Nelayan Merah-Putih

50 Digitalisasi Pendidikan

52 Tiga Juta Rumah per Tahun

54 Kenaikan Gaji Hakim

56 Komponen Cadangan Tentara Nasional Indonesia

58 Universitas Republik Indonesia

60 Kesimpulan

LATAR BELAKANG

Dalam konteks perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang semakin kompleks, kebutuhan terhadap data berbasis opini publik menjadi semakin krusial. Opini publik tidak hanya merefleksikan persepsi masyarakat terhadap kondisi aktual, tetapi juga berfungsi sebagai indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan, legitimasi pemerintahan, serta arah pembangunan nasional. Dalam perspektif kebijakan publik, persepsi masyarakat merupakan salah satu variabel penting dalam menilai keberhasilan suatu program, karena keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari luaran administratif, tetapi juga dari penerimaan dan dampaknya di tingkat masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, berbagai lembaga survei nasional telah menunjukkan bahwa pengukuran opini publik mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat kepercayaan, kepuasan, serta ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah. Sebagaimana terlihat dalam survei nasional yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia, pengukuran terhadap kinerja pemerintah, program prioritas, serta isu-isu strategis nasional menjadi instrumen penting dalam membaca dinamika hubungan antara negara dan masyarakat . Survei semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif.

Di sisi lain, kondisi global yang ditandai oleh ketidakpastian geopolitik, fluktuasi ekonomi, serta perubahan tatanan internasional turut memberikan dampak signifikan terhadap kondisi domestik. Tantangan seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, ketimpangan sosial, pengangguran, serta isu tata kelola pemerintahan menjadi perhatian utama masyarakat. Dalam situasi seperti ini, pemerintah dituntut untuk mampu menjaga stabilitas sekaligus menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana masyarakat menilai kinerja pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.

Selain itu, perkembangan demokrasi di Indonesia menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses politik. Tingkat kepercayaan terhadap institusi negara, partai politik, serta lembaga penegak hukum menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi. Rendahnya kepercayaan publik dapat berdampak pada melemahnya legitimasi institusi, sementara tingginya kepercayaan dapat memperkuat stabilitas politik dan sosial. Oleh karena itu, pengukuran terhadap tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap lembaga negara menjadi bagian penting dalam kajian kebijakan publik.

Dalam konteks akademik, survei opini publik juga memiliki peran strategis sebagai sumber data empiris yang dapat digunakan untuk pengembangan teori, analisis kebijakan, serta rekomendasi berbasis *evidence*. Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Ahmad dalan yang selanjutnya disebut PSKP UAD, merupakan lembaga yang di dalamnya membahas Isu Politik, Sosial, Kebijakan dan Demokrasi. Sebagai lembaga riset memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan kajian yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui pelaksanaan survei ini, PSKP UAD diharapkan dapat berkontribusi dalam menyediakan data yang valid dan reliabel untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai level.

Lebih lanjut, survei ini juga penting untuk memetakan persepsi publik secara lebih detail berdasarkan karakteristik demografis, seperti wilayah, usia, pendidikan, dan latar belakang sosial-ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai variasi persepsi masyarakat, sehingga dapat diidentifikasi kelompok-kelompok tertentu yang memiliki pandangan berbeda terhadap isu-isu tertentu. Dengan demikian, hasil survei tidak hanya memberikan gambaran umum, tetapi juga mampu menjelaskan dinamika sosial secara lebih spesifik.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, pelaksanaan survei opini publik menjadi sangat penting sebagai instrumen untuk Mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan kebijakan publik, Mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama masyarakat, Menganalisis tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara dan institusi demokrasi, Menyediakan data empiris sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, survei ini diharapkan tidak hanya menghasilkan data deskriptif, tetapi juga mampu memberikan insight analitis yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

PSKP
Pusat Studi Kebijakan Publik

Urgensi Evaluasi Program Prioritas Prabowo-Gibran

Urgensi Evaluasi Program Prioritas Prabowo-Gibran

Demokrasi bukan hanya soal memenangkan pemilu, tetapi memastikan amanat yang diberikan rakyat benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang menyejahterakan. Publik dan kaum terdidik menaruh harapan bahwa kepemimpinan baru mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, menjamin keterjangkauan akses pendidikan, menciptakan lapangan kerja yang layak, serta menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi momentum sangat penting untuk menilai sejauh mana janji-janji politik dan program strategis itu diwujudkan untuk kemaslahatan publik, bukan sekadar melayani kepentingan elitis atau formalitas seremonial. Jika fase dua tahun ini tidak dikritisi secara serius dan mendalam, kesalahan strategis dalam eksekusi kebijakan berpotensi dibiarkan terus berlangsung dan menjadi normalitas baru yang merusak.

Evaluasi yang tajam dan berbasis data (*evidence-based review)* mampu membongkar kesenjangan antara retorika politik di media dan realitas kebijakan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Evaluasi bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memastikan ruang publik tetap rasional, obyektif, dan faktual, agar penilaian terhadap kinerja negara tidak dibangun di atas klaim keberhasilan sepihak melalui narasi pencitraan maupun corong-corong pendengung *(buzzers).*

Studi evaluasi dua tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran ini dilakukan tidak hanya untuk menilai kinerja secara teknokratik, tetapi juga untuk memahami sejauh mana implementasi 15 program prioritas pemerintah memberi dampak riil serta memenuhi asas ketepatan sasaran bagi masyarakat. Dengan menghimpun suara agregat dari populasi 10,75 juta mahasiswa di seluruh Indonesia sebagai pilar *social control* dan *educated voters*, hasil evaluasi ini diharapkan tidak sekadar menjadi instrumen akuntabilitas bagi publik, tetapi juga menjadi masukan korektif *(policy correction)* bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam memperkuat efektivitas kinerja di sisa masa jabatan.

Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Ahmad Dahlan menginisiasi studi nasional ini sebagai wujud komitmen pengawasan akademis yang independen. Riset ini membedah secara menyeluruh lintas sektor untuk menguji capaian, ketepatan sasaran, serta tantangan dalam 15 program prioritas utama, meliputi sektor pendidikan dan perguruan tinggi, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi rural dan permukiman, hingga ketahanan energi dan pertahanan nasional.

PSKP
Pusat Studi Kebijakan Publik

Pertanyaan Studi

Pertanyaan Studi

01 Bagaimana persepsi mahasiswa sebagai pilar social control dan kelompok terdidik terhadap efektivitas kepemimpinan, tingkat kebermanfaatan *(perceived benefit)*, serta ketepatan sasaran *(targeting accuracy)* dari program-program strategis pemerintah setelah dua tahun berjalan?

02 Apa rekomendasi dan usulan kebijakan strategis yang perlu diprioritaskan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu dekat untuk memperkuat efektivitas program, memperbaiki tata kelola pelaksanaan, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan?

PSKP
Pusat Studi Kebijakan Publik

Data dan angka yang terpampang dalam laporan riset PSKP UAD ini bukanlah sekadar opini peneliti, melainkan cerminan obyektif dari suara, persepsi, dan aspirasi mahasiswa di seluruh Indonesia. Evaluasi dua tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran merupakan momentum emas untuk introspeksi serta koreksi kebijakan *(policy correction)*, dan hanya pemerintahan yang sungguh-sungguh berpihak pada kesejahteraan rakyat yang berani memanfaatkannya secara jujur dan terbuka.

PSKP
Pusat Studi Kebijakan Publik

Metodologi

Metodologi

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei potong lintang *(cross-sectional)*. Pengumpulan data dilakukan secara serentak dalam satu kurun waktu (06-20 September 2026) tertentu menggunakan kuesioner digital terstruktur untuk memetakan persepsi, penilaian, dan sikap kritis mahasiswa terhadap dua tahun implementasi kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran.

Populasi dan Penentuan Sampel

a. Populasi Penelitian

Populasi *(N)* dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif yang terdaftar di perguruan tinggi Indonesia. Berdasarkan data Statistik Pendidikan Tinggi 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, total populasi mahasiswa terdaftar mencapai 10.754.154 mahasiswa.

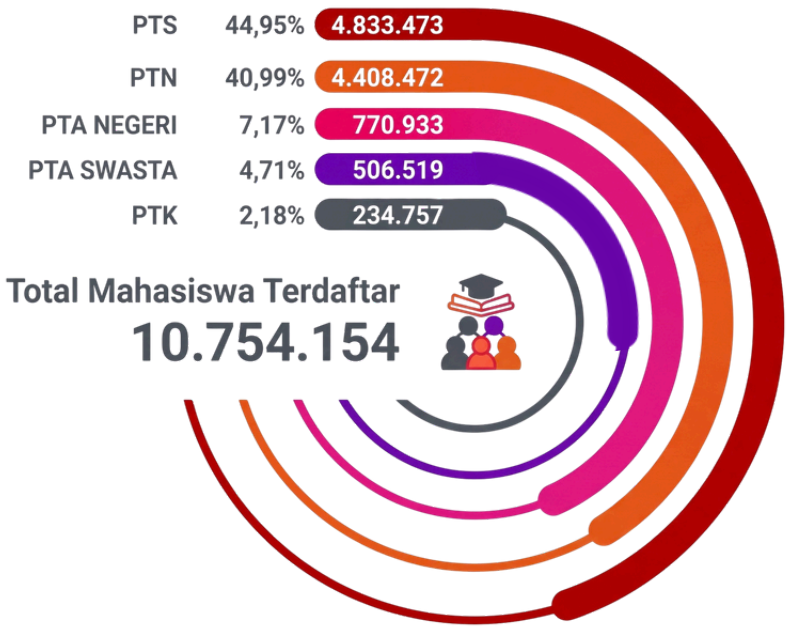

b. Perhitungan Ukuran Sampel

Penentuan jumlah sampel minimal (n) dihitung menggunakan Rumus Slovin dengan tingkat toleransi kesalahan (*margin of error / e*) sebesar 5% (0,05):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{10.754.154}{1 + 10.754.154 \times (0{,}05)^2} = \frac{10.754.154}{1 + 26.885{,}385} = \frac{10.754.154}{26.886{,}385} = 399{,}985$$

$$\approx 400 \text{ responden}$$

Berdasarkan kalkulasi tersebut, jumlah sampel minimal yang ditargetkan dan dianalisis dalam survei nasional ini diset genap menjadi n = 400 responden.

Berdasarkan perhitungan ukuran sampel dengan *margin of error* 5% dan tingkat kepercayaan 95%, jumlah minimal responden yang dibutuhkan adalah sekitar 400 responden. Namun, survei ini berhasil menghimpun 828 responden mahasiswa dari berbagai daerah. Penambahan jumlah sampel melebihi target minimal ini berhasil menekan margin of error real menjadi sekitar ±3,4%, sekaligus meningkatkan ketepatan estimasi statistik dan representativitas temuan secara lintas sektor.

PSKP
Pusat Studi Kebijakan Publik

Profil Demografi

10

Profil Demografi

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

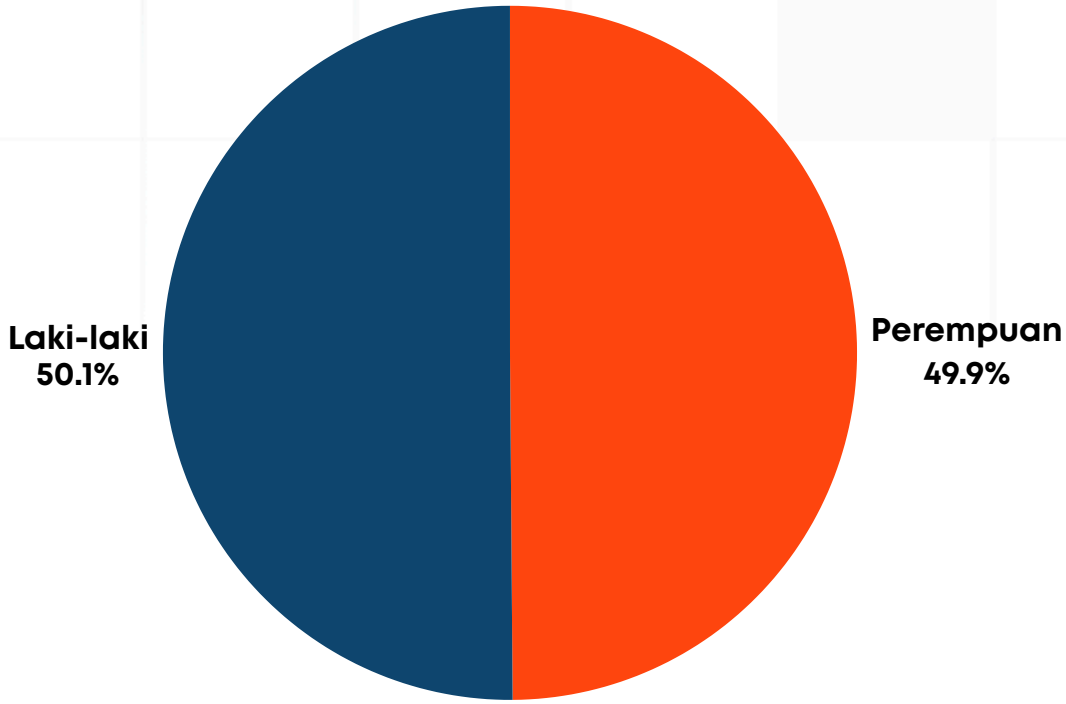

Sebaran responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan komposisi yang sangat seimbang, yaitu 50,1% laki-laki (415 orang) dan 49,9% perempuan (413 orang) dengan selisih yang sangat tipis (hanya 2 responden atau 0,2%). Keseimbangan proporsi ini mencerminkan struktur demografi mahasiswa di Indonesia yang homogen serta memenuhi kaidah keterwakilan gender *(gender representativeness)* yang proporsional dalam survei opini publik skala nasional.

b. Berdasarkan Rentang Usia

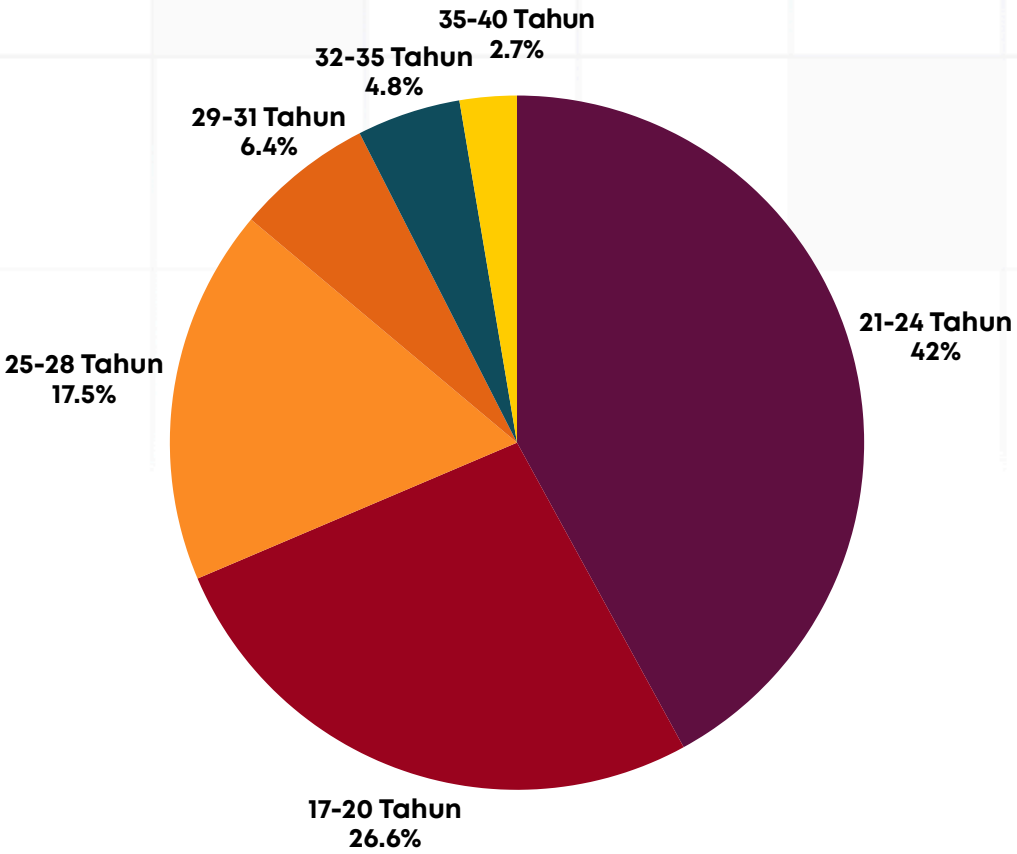

Dominasi Generasi Z dan kelompok usia produktif muda yang mencapai 86,1% dari total 828 responden terutama ditopang oleh kelompok usia 21–24 tahun sebesar 42,0% (348 responden) serta usia 17–20 tahun sebesar 26,6% (220 responden) menegaskan bahwa profil demografi riset ini secara sahih merepresentasikan suara murni kelompok terdidik yang berada dalam fase kritis transisi menuju dunia kerja. Struktur demografi yang terpusat pada angkatan muda ini menjelaskan sensitivitas responden yang sangat tinggi terhadap beban biaya hidup *(cost-of-living pressure)*, sehingga mendorong tingginya apresiasi pada program-program layanan dasar universal, sekaligus melayangkan kritik tajam terhadap alokasi anggaran belanja negara yang dinilai elitis, sektoral, maupun berbiaya tinggi tanpa dampak kesejahteraan yang nyata.

C. Berdasarkan Agama

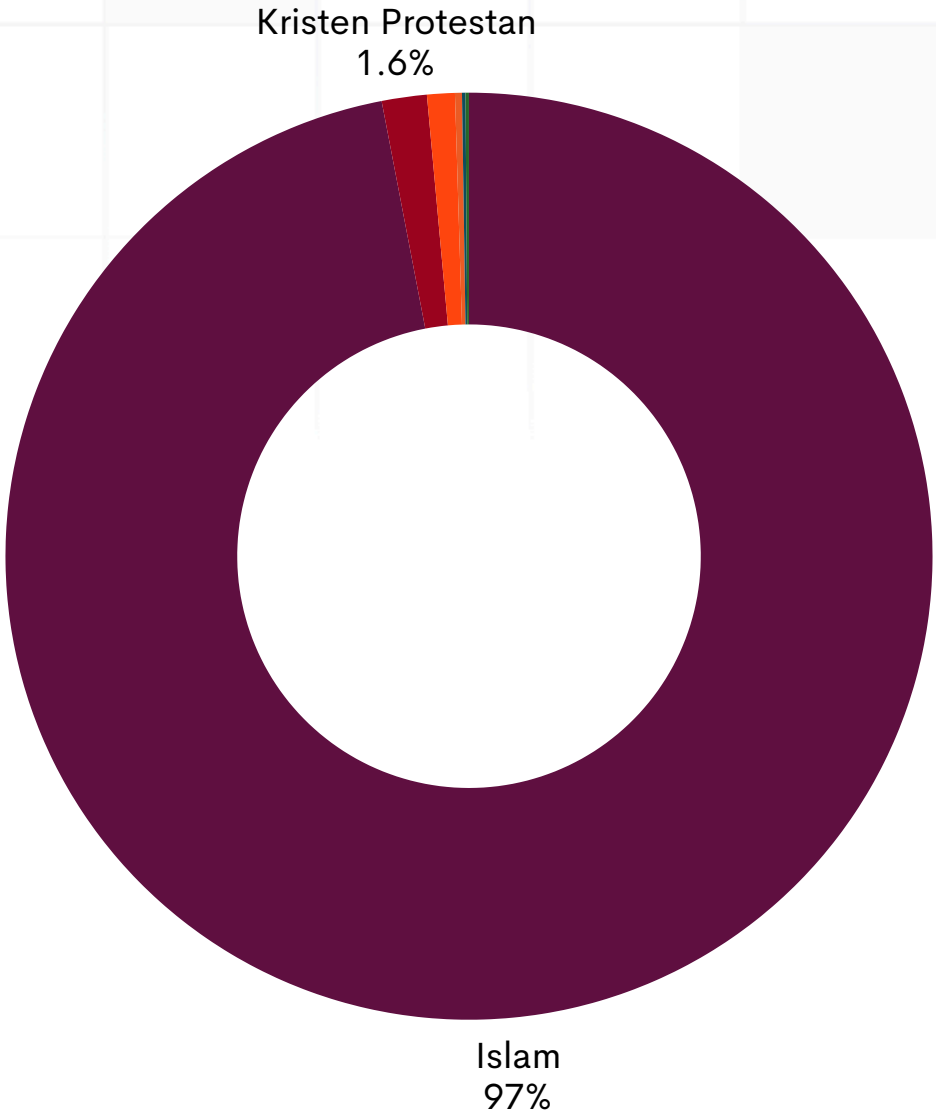

Dominasi responden beragama Islam yang mencapai 97,0% (803 responden) didampingi oleh responden lintas iman seperti Kristen Protestan sebesar 1,6% (13 responden), Kristen Katolik 1,0% (8 responden), Kepercayaan Terhadap Tuhan YME 0,2% (2 responden), serta Buddha dan Hindu masing-masing 0,1% (1 responden

d. Berdasarkan Asal Daerah (Provinsi)

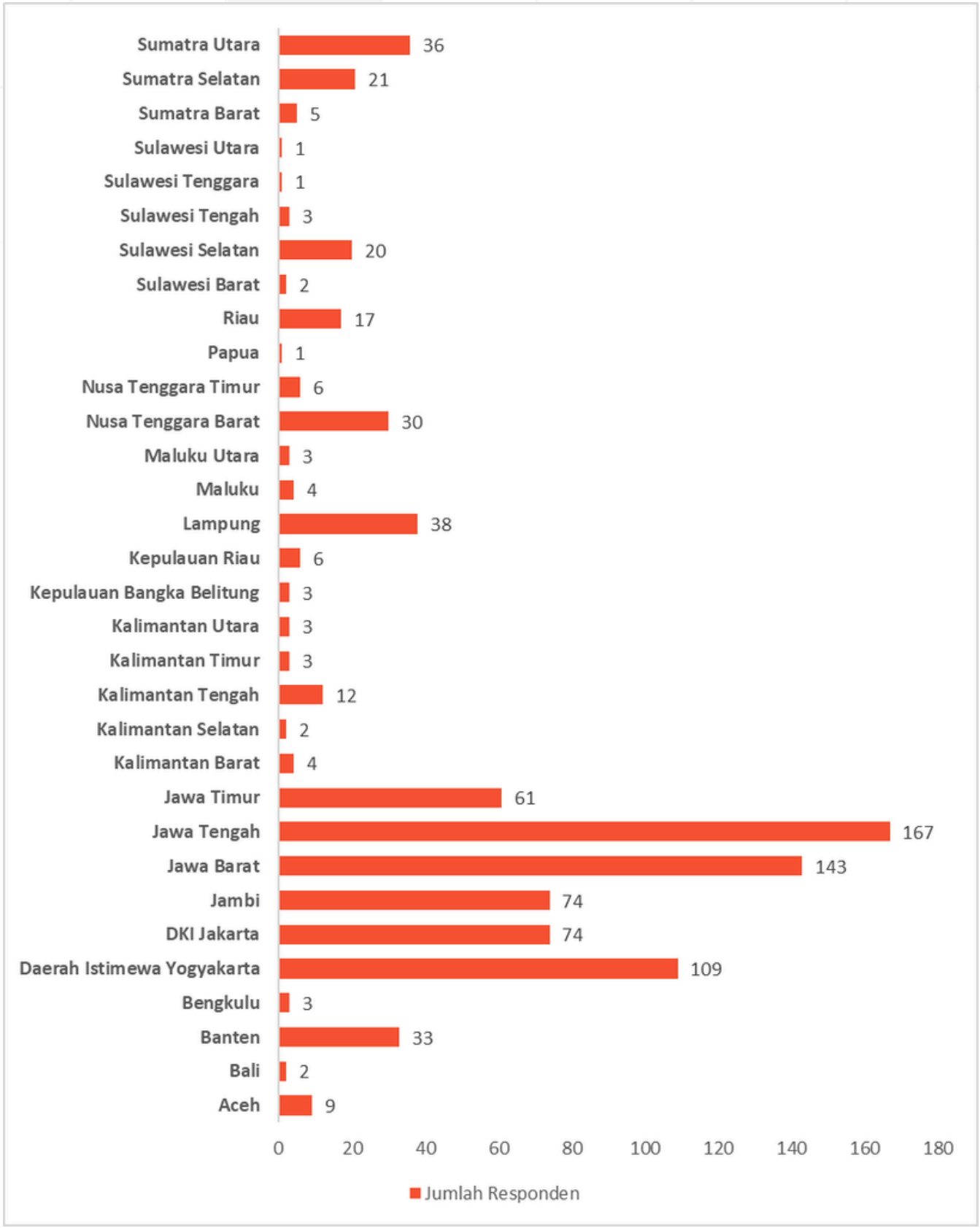

Berdasarkan sebaran geografis, survei ini menghimpun total 828 responden yang berasal dari 32 provinsi di Indonesia. Mayoritas responden terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan jumlah mencapai 587 orang atau sebesar 70,9% dari total keseluruhan sampel. Tiga provinsi dengan kontribusi responden terbanyak secara nasional berada di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah sebanyak 167 orang (20,2%), Jawa Barat sebanyak 143 orang (17,3%), dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 109 orang (13,2%), yang kemudian diikuti oleh DKI Jakarta sebanyak 74 orang (8,9%), Jawa Timur sebanyak 61 orang (7,4%), serta Banten sebanyak 33 orang (4,0%).

Sementara itu, sebanyak 241 responden atau 29,1% sisanya berasal dari wilayah luar Pulau Jawa. Wilayah Sumatra menyumbang proporsi terbesar di luar Jawa yaitu sebanyak 144 responden (17,4%), dengan penyumbang terbanyak berasal dari Lampung (38 orang / 4,6%) dan Sumatra Utara (36 orang / 4,3%). Kawasan Bali dan Nusa Tenggara diwakili oleh 38 responden (4,5%) yang didominasi dari Nusa Tenggara Barat (30 orang / 3,6%). Selanjutnya, wilayah Sulawesi mencatatkan 27 responden (3,3%) yang utamanya berasal dari Sulawesi Selatan (20 orang / 2,4%), wilayah Kalimantan diwakili oleh 24 responden (2,9%) dengan kontribusi terbesar dari Kalimantan Tengah (12 orang / 1,4%), serta kawasan Maluku dan Papua diwakili oleh 8 responden (1,0%).

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

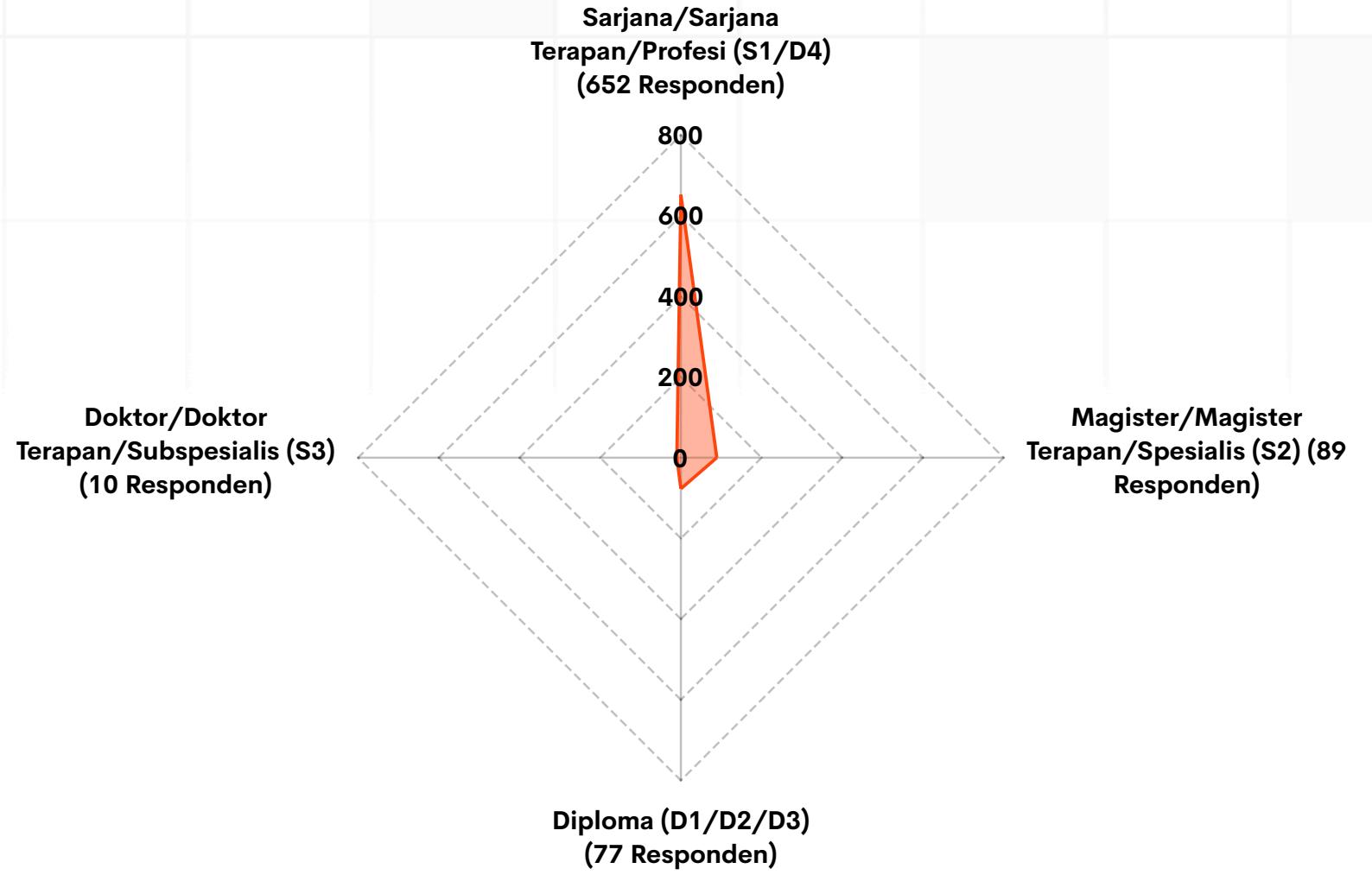

Berdasarkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh, mayoritas dari total 828 responden berada pada tingkat Sarjana / Sarjana Terapan / Profesi (S1 / D4), yaitu sebanyak 652 orang atau sebesar 78,7%. Kelompok terbesar kedua diisi oleh responden jenjang Magister / Magister Terapan / Spesialis (S2) sebanyak 89 orang (10,7%), disusul oleh jenjang Diploma (D1 / D2 / D3) sebanyak 77 orang (9,3%). Sementara itu, jenjang Doktor / Doktor Terapan / Subspesialis (S3) mencatatkan proporsi terkecil yaitu sebanyak 10 responden atau sebesar 1,2% dari total keseluruhan sampel.

f. Berdasarkan Status Perguruan Tinggi

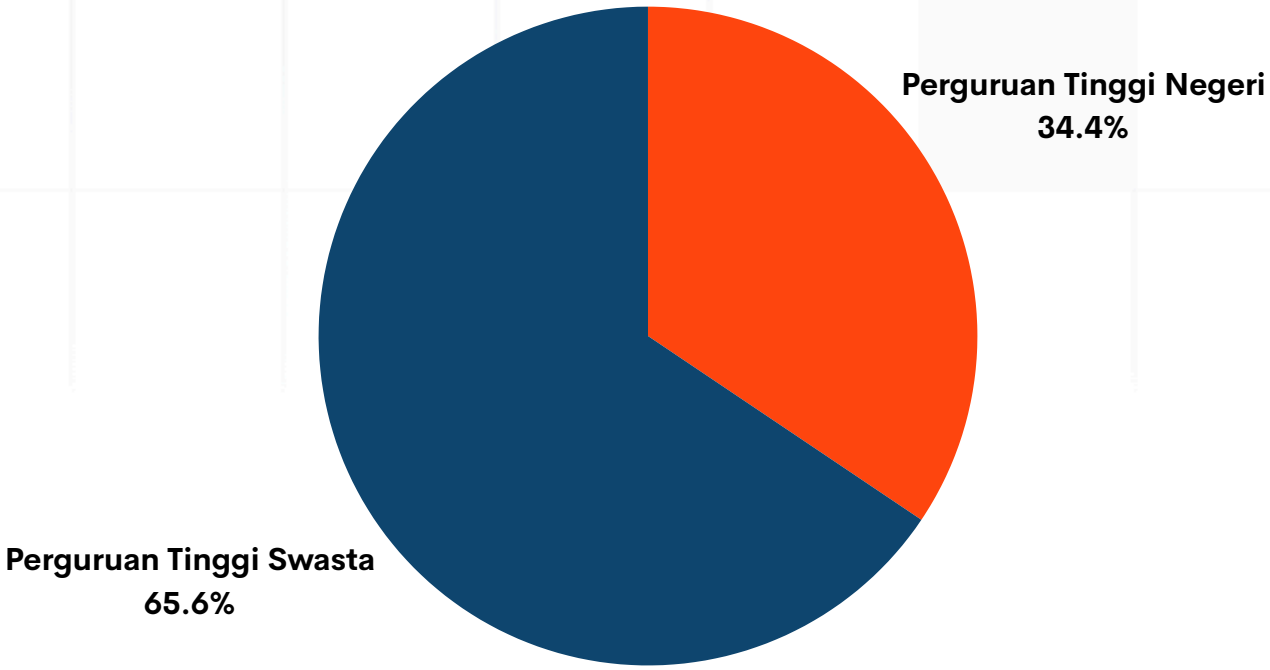

Berdasarkan status perguruan tinggi tempat menempuh studi, mayoritas dari total 828 responden berasal dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS), yaitu sebanyak 543 orang atau sebesar 65,6%. Sementara itu, responden yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tercatat sebanyak 285 orang atau mencakup 34,4% dari total keseluruhan sampel.

PSKP
Pusat Studi Kebijakan Publik

Penilaian Kinerja Kabinet Prabowo-Gibran

Penilaian Kinerja Kabinet Prabowo-Gibran

Responden ditanyakan "Secara keseluruhan, bagaimana Anda menilai kinerja Kabinet Prabowo–Gibran selama dua tahun pertama pemerintahan?"

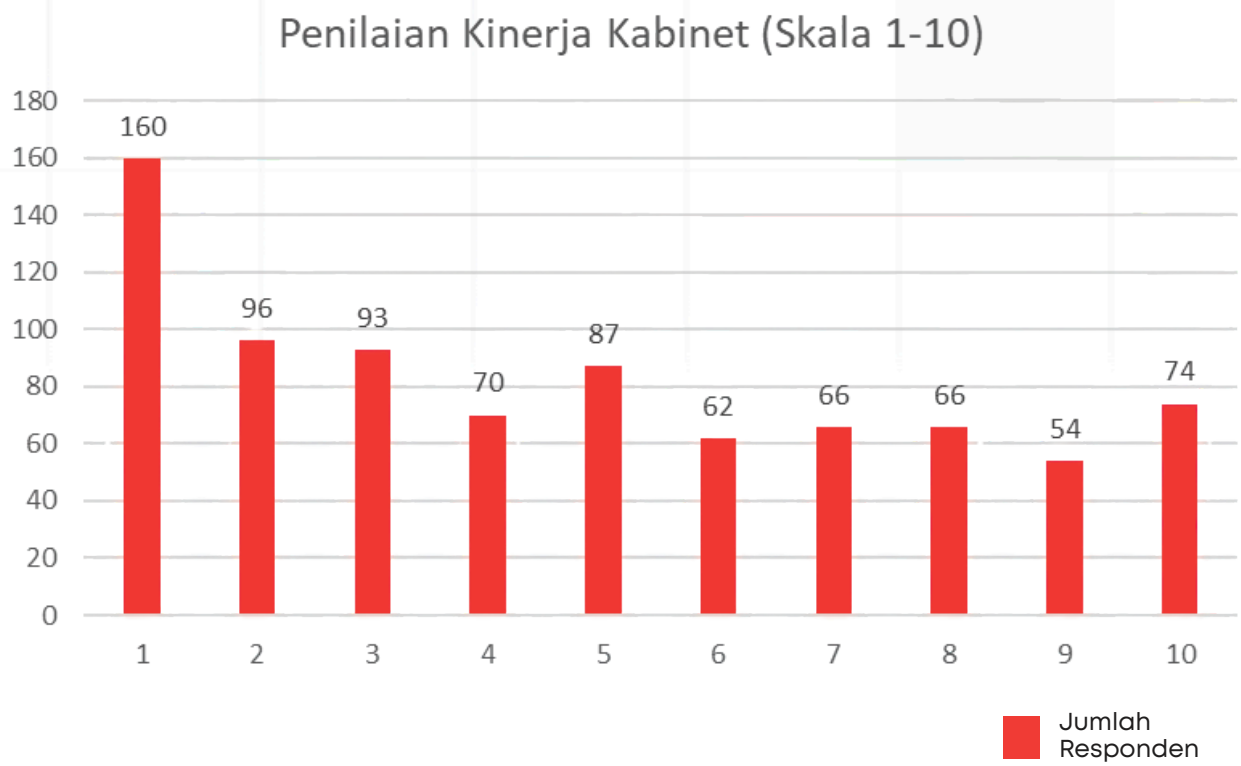

a. Rapor Merah Paruh Waktu

Mayoritas Mahasiswa Menilai Kinerja Kabinet di Bawah Standar Hasil evaluasi nasional menunjukkan bahwa kinerja dua tahun Kabinet Prabowo–Gibran mendapatkan skor rata-rata 4,75 dari skala 10. Dalam kerangka evaluasi kebijakan publik, angka di bawah 5,00 menandakan bahwa persepsi publik berada pada zona merah atau belum memenuhi ekspektasi minimal. Lebih dari separuh responden (50,60%) memberikan penilaian berada pada rentang 1 hingga 4. Hal ini mencerminkan adanya kekecewaan yang meluas terhadap efektivitas eksekusi program strategis, tata kelola komunikasi publik, maupun dampak langsung pembangunan ekonomi yang belum dirasakan oleh mayoritas kalangan terdidik.

b. Puncak Ketidakpuasan: Skor 1 Menjadi Pilihan Utama

Temuan mendasar yang perlu dicermati oleh pemerintah adalah tingginya angka penilai pada ekstrem terbawah. Skor 1 menjadi pilihan tunggal terbesar (modus) dengan persentase mencapai 19,32% (160 responden). Akumulasi penilaian pada kelompok skor sangat buruk (skor 1, 2, dan 3) yang mencapai 42,14% menunjukkan bahwa kritik terhadap kabinet adalah bentuk penolakan dan ketidakpuasan yang tegas terhadap arah kebijakan yang dijalankan selama dua tahun terakhir.

c. Gejala Polarisasi Persepsi Publik

Meskipun grafik didominasi oleh tren penilai negatif di sisi kiri, terdapat fenomena penumpukan kecil pada skor 10 (8,94% / 74 responden). Polarisasi ini menggambarkan adanya pembelahan persepsi di tingkat mahasiswa: satu kelompok yang melihat implementasi program secara kritis dan penuh catatan evaluatif, versus kelompok yang memberikan dukungan penuh tanpa catatan *(unconditional approval).* Namun demikian, proporsi kelompok kritis jauh lebih dominan dibanding kelompok apresiatif (38,89%), yang menandakan bahwa narasi keberhasilan pemerintah belum berhasil meyakinkan mayoritas publik rasional.

d. *Policy Implications*

1. Tingginya persentase ketidakpuasan (>50%) mengonfirmasi bahwa pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan klaim keberhasilan sepihak. Rekomendasi perombakan *(reshuffle)* atau penataan ulang prioritas kementerian yang lamban menjadi kebutuhan yang mendesak.

2. Program-program prioritas yang menyerap anggaran besar belum mampu dikonversikan menjadi persepsi positif yang solid di mata mahasiswa, menuntut adanya audit ketepatan sasaran *(targeting accuracy)* pada implementasi lapangan.

PSKP
Pusat Studi Kebijakan Publik

Program Prioritas Prabowo-Gibran dan Manfaatnya

Program Prioritas Prabowo-Gibran dan Manfaatnya

5 Program Prioritas Prabowo-Gibran yang paling dirasakan Manfaatnya

Melalui Pertanyaan "Apa 5 Program prioritas Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang paling dirasakan manfaatnya?" maka hasil nya akan tertera sebagai berikut:

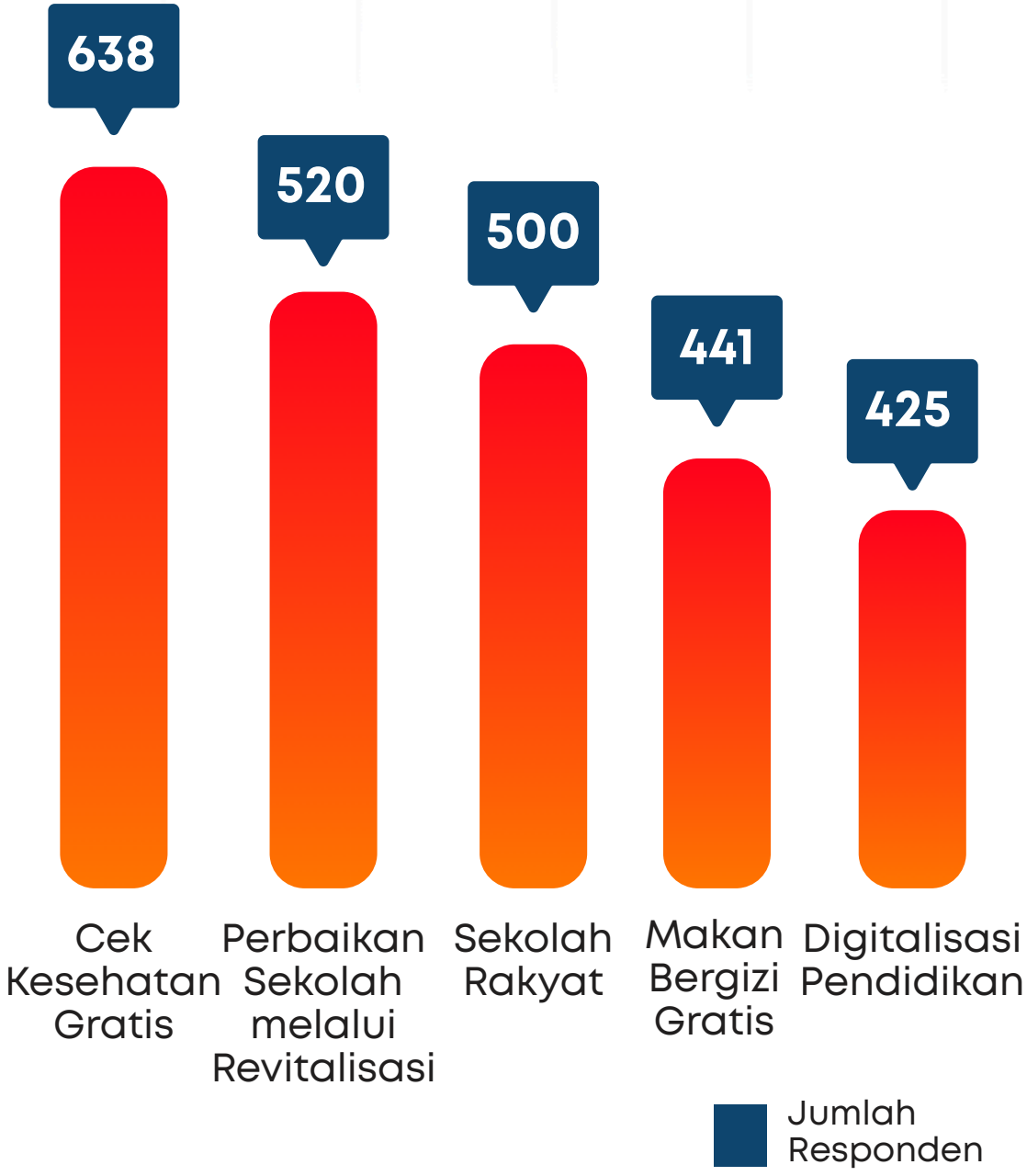

5 Program Prioritas Prabowo-Gibran yang paling Sedikit dirasakan Manfaatnya

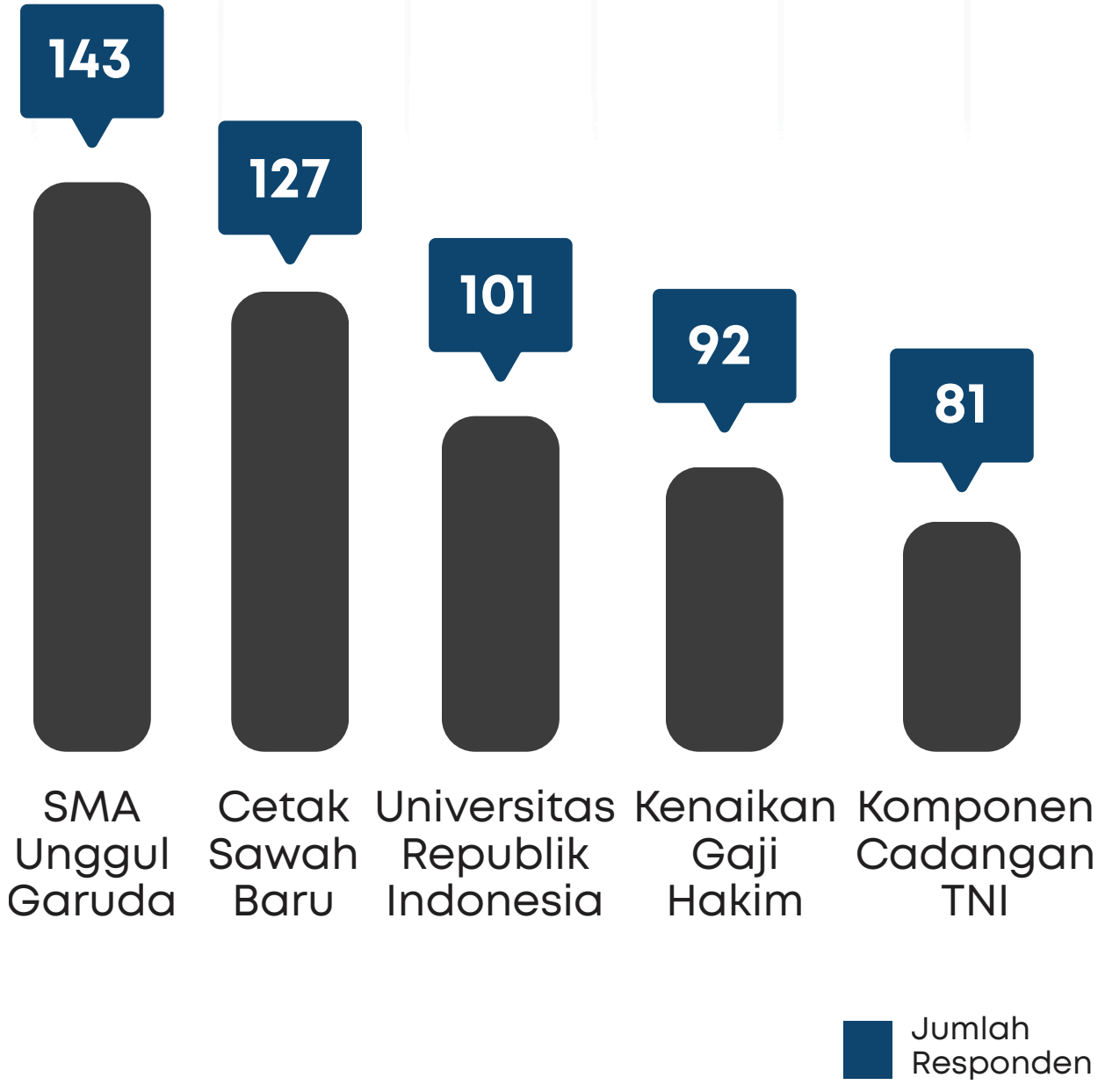

a. Dominasi Sektor Layanan Dasar

Program Cek Kesehatan Gratis menjadi kebijakan yang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh publik, dipilih oleh 77,05% responden (638 mahasiswa). Disusul oleh Perbaikan Sekolah melalui Revitalisasi Satuan Pendidikan (62,80%) dan Sekolah Rakyat (60,39%). Temuan ini mengonfirmasi bahwa masyarakat dan mahasiswa secara konsisten memberikan apresiasi tertinggi pada program-program publik yang bersifat inklusif, langsung menyentuh kebutuhan fisik dasar, serta memperbaiki fasilitas pendidikan masyarakat kelas bawah secara riil.

b. Pandangan Publik atas Program Unggulan Makan Bergizi Gratis & Digitalisasi

Program Cek Kesehatan Gratis menjadi kebijakan yang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh publik, dipilih oleh 77,05% responden (638 mahasiswa). Disusul oleh Perbaikan Sekolah melalui Revitalisasi Satuan Pendidikan (62,80%) dan Sekolah Rakyat (60,39%). Temuan ini mengonfirmasi bahwa masyarakat dan mahasiswa secara konsisten memberikan apresiasi tertinggi pada program-program publik yang bersifat inklusif, langsung menyentuh kebutuhan fisik dasar, serta memperbaiki fasilitas pendidikan masyarakat kelas bawah secara riil.

c. Marginalisasi Program Elitis, Sektoral, dan Berbiaya Tinggi

Di sisi lain, lima posisi terbawah didominasi oleh program-program yang bersifat sektoral, elitis, atau dinilai berjarak dari kebutuhan mendesak rakyat sehari-hari:

Kenaikan Gaji Hakim (11,11%) dan Komponen Cadangan TNI (9,78%) menempati posisi terbawah. Mahasiswa memandang kebijakan peningkatan insentif aparatur hukum maupun militerisasi sipil tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat luas.

Universitas Republik Indonesia/URI (12,20%) dan SMA Unggul Garuda (17,27%) mendapatkan apresiasi yang sangat rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa publik lebih membutuhkan pemerataan kualitas sekolah/kampus yang sudah ada ketimbang pembentukan lembaga pendidikan eksklusif baru yang berpotensi memicu ketimpangan akses.

Program fisik bernilai anggaran besar seperti Cetak Sawah Baru (15,34%) belum dirasakan dampaknya secara signifikan, yang mencerminkan lamanya eksekusi birokrasi dan minimnya jangkauan manfaat serta dampak negatif dari alih fungsi lahan.

PSKP
Pusat Studi Kebijakan Publik

Program Prioritas Prabowo-Gibran Paling Tepat dan Tidak Tepat Sasaran

Program Prioritas Prabowo-Gibran Paling Tidak Tepat Sasaran

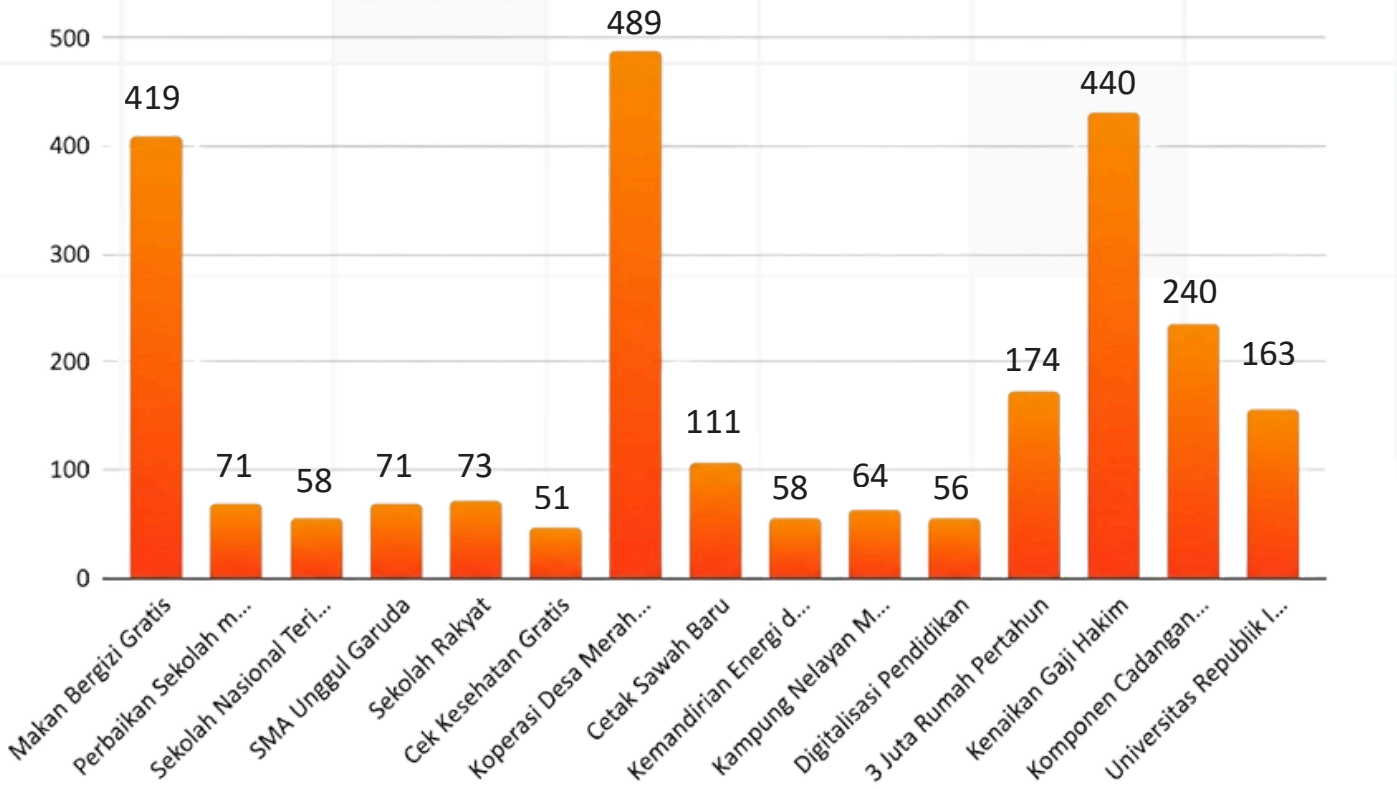

Responden ditanyakan "Apa Program Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang paling tidak dirasakan manfaatnya?"

Top 3 Program Prioritas Prabowo-Gibran Paling Tidak Tepat Sasaran

Distorsi Birokrasi, Elite Capture, dan Kebocoran Anggaran

Berdasarkan Pilihan oleh Responden

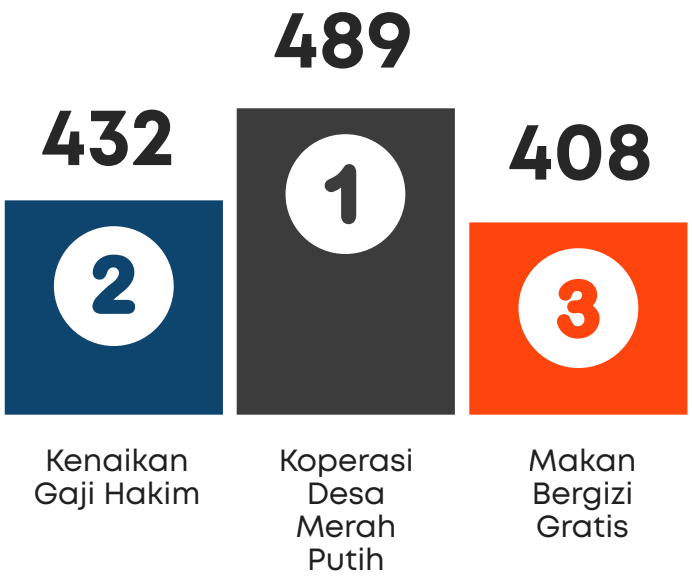

Top 3 Paling Tidak Tepat Sasaran: Distorsi Birokrasi, *Elite Capture*, dan Kebocoran Anggaran:

Dianggap sebagai program yang paling gagal dalam penetapan target *(worst-targeted).* Pendekatan *top-down* dalam pembentukan kelembagaan desa ini dinilai rawan mengalami penyerobotan oleh elit lokal *(elite capture)* ketimbang memberdayakan petani miskin dan buruh tani di tingkat tapak.

a. Koperasi Desa Merah Putih / KDKMP (59,60% / 489 responden)

Dianggap sebagai program yang paling gagal dalam penetapan target. Pendekatan *top-down* dalam pembentukan Koperasi desa ini dinilai rawan mengalami penyerobotan oleh elit lokal ketimbang memberdayakan petani miskin dan buruh tani di tingkat tapak.

b. Kenaikan Gaji Hakim (52,17% / 432 responden)

Mendapatkan penolakan tajam dari mayoritas publik terdidik karena dianggap mengalokasikan insentif APBN secara berlebihan kepada kelompok aparatur elit. Mahasiswa menilai kebijakan ini tidak berkorelasi dengan pembenahan kualitas hukum dasar yang dibutuhkan masyarakat miskin, seperti akses bantuan hukum gratis dan penuntasan korupsi.

c. Makan Bergizi Gratis / BGN (49,28% / 408 responden)

Masuknya program *flagship* ini ke jajaran tiga besar ketidaktepatan sasaran menggarisbawahi tingginya risiko *inclusion error*. Skema penyaluran yang bersifat tidak berjenjang *(non-targeted/blanket coverage)* memicu pemborosan anggaran pada kelompok siswa mampu di perkotaan, sembari memperlebar ancaman *exclusion error* bagi sekolah-sekolah di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Program Prioritas Prabowo-Gibran paling Tepat Sasaran

Keunggulan Layanan Publik Universal (Universal Basic Services)
Berdasarkan Pilihan oleh Responden

a. Cek Kesehatan Gratis (50,80% / 48 responden)

Menjadi program dengan tingkat ketidaktepatan sasaran terendah di Indonesia. Skema pelayanan kesehatan yang dibuka langsung tanpa sekat birokrasi yang rumit terbukti secara empiris menutup celah manipulasi data, diskriminasi penerima manfaat, maupun prapraktik korupsi penyaluran.

b. Digitalisasi Pendidikan (6,64% / 55 responden)

Berhasil meminimalkan persepsi penyimpangan sasaran karena bantuan langsung berupa sarana teknologi dan jaringan ke sekolah-sekolah dinilai dapat diverifikasi secara fisik dan memberikan dampak langsung pada kegiatan belajar-mengajar.

c. Sekolah Nasional Terintegrasi per Kab/Kota (6,76% / 56 responden)

Dinilai sebagai wujud nyata pemerataan infrastruktur pendidikan antardaerah. Pembangunan fisik sekolah percontohan ini mendapat apresiasi karena dianggap sebagai investasi strategis yang wujudnya konkret, terukur, dan mudah diawasi langsung oleh publik.

d. Kemandirian Energi/Air di Lingkungan Sekolah (6,76% / 56 responden)

Dinilai sebagai inovasi fasilitas yang berdampak langsung pada efisiensi. Pengadaan panel surya dan instalasi air bersih mendapat sentimen positif karena terbukti menurunkan beban biaya operasional sekolah sekaligus menjamin kenyamanan belajar-mengajar secara berkelanjutan.

PSKP
Pusat Studi Kebijakan Publik

Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis

Responden ditanyakan "Sejauh mana Anda merasakan dampak atau kebermanfaatan dari program Makan Bergizi Gratis?" (Keterangan skala: 1 = Sangat Tidak Berdampak/Sangat Buruk hingga 5 = Sangat Berdampak/Sangat Baik)

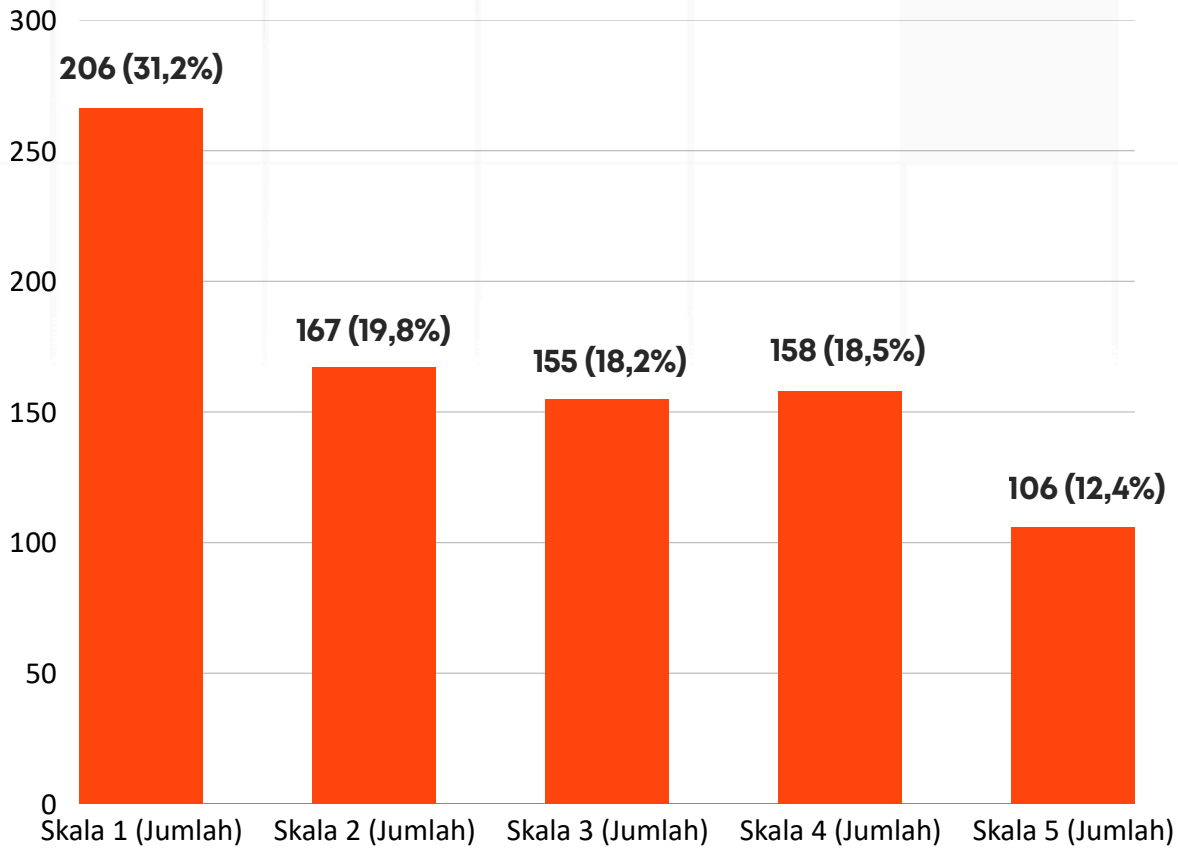

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terperosok ke peringkat ke-11 dari 15 program prioritas dengan skor rata-rata (mean) 2,61 dari 5,00, akibat kuatnya sentimen negatif publik terdidik yang mencapai 50,8% (421 responden) di mana 31,5% (261 responden) menilai Sangat Buruk dan 19,3% (160 responden) menilai Buruk. Rendahnya skor kinerja ini mencerminkan defisit legitimasi publik yang tajam akibat besarnya beban APBN yang dinilai riskan menggeser alokasi anggaran layanan dasar mendesak lainnya, serta tingginya risiko pemborosan fiskal *(inclusion error)* akibat skema penyaluran seragam (blanket coverage) tanpa *socio-economic* targeting yang presisi. Temuan ini menegaskan urgensi bagi pemerintah untuk segera merestrukturisasi pelaksanaan MBG dari pendekatan universal menjadi intervensi terfokus *(geographical targeting)* di wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem dan kasus stunting tinggi.

PSKP
Pusat Studi Kebijakan Publik

Perbaikan Sekolah melalui Revitalisasi Satuan Pendidikan

Perbaikan Sekolah melalui Revitalisasi Satuan Pendidikan

Responden ditanyakan "Sejauh mana Anda merasakan dampak atau kebermanfaatan dari program Perbaikan Sekolah melalui Revitalisasi Satuan Pendidikan?" (Keterangan skala: 1 = Sangat Tidak Berdampak/Sangat Buruk hingga 5 = Sangat Berdampak/Sangat Baik)

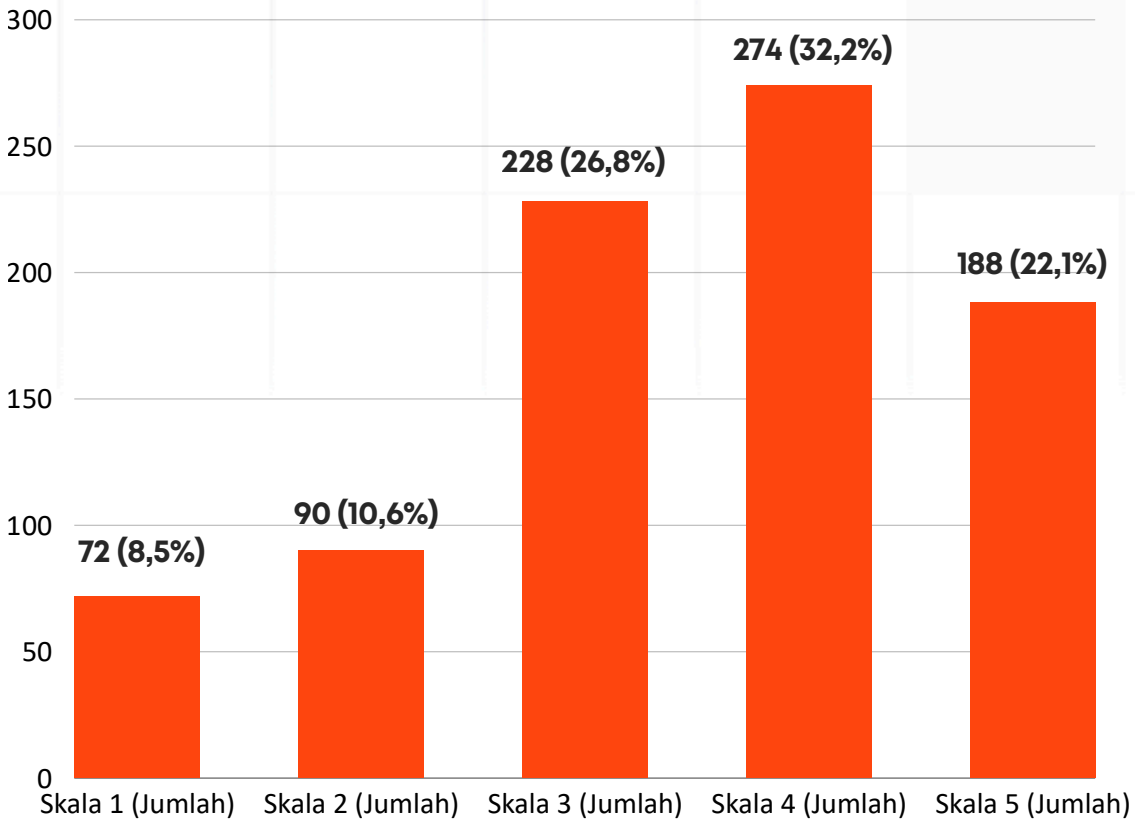

Program Perbaikan Sekolah melalui Revitalisasi Satuan Pendidikan mengamankan peringkat ke-4 dari 15 program prioritas dengan skor rata-rata (mean) 3,46 dari 5,00, didukung oleh akumulasi sentimen positif publik terdidik sebesar 53,5% (443 responden) terdiri dari 32,6% (270 responden) yang menilai Baik dan 20,9% (173 responden) menilai Sangat Baik serta sentimen negatif yang tergolong rendah sebesar 19,3% (160 responden). Tingginya tingkat kepuasan serta rendahnya angka ketidaktepatan sasaran (8,33%) mencerminkan legitimasi sosial yang kuat terhadap strategi optimalisasi aset yang ada *(existing asset optimization)* sebagai bentuk alokasi anggaran yang berkeadilan redistributif *(redistributive justice),* di mana pembenahan fasilitas belajar yang rusak dinilai jauh lebih efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan siswa ketimbang pemborosan APBN untuk pendirian lembaga baru. Temuan ini merekomendasikan agar pemerintah memfokuskan porsi mayoritas belanja fungsi pendidikan untuk pemugaran sekolah di kawasan 3T yang disertai pengawasan publik berbasis digital guna meminimalkan hambatan birokrasi pengadaan di tingkat daerah.

PSKP
Pusat Studi Kebijakan Publik

Sekolah Nasional Terintegrasi setiap Kabupaten/Kota

Sekolah Nasional Terintegrasi setiap Kabupaten/Kota

Responden ditanyakan "Sejauh mana Anda merasakan dampak atau kebermanfaatan dari program Sekolah Nasional Terintegrasi setiap Kabupaten/Kota?" (Keterangan skala: 1 = Sangat Tidak Berdampak/Sangat Buruk hingga 5 = Sangat Berdampak/Sangat Baik)

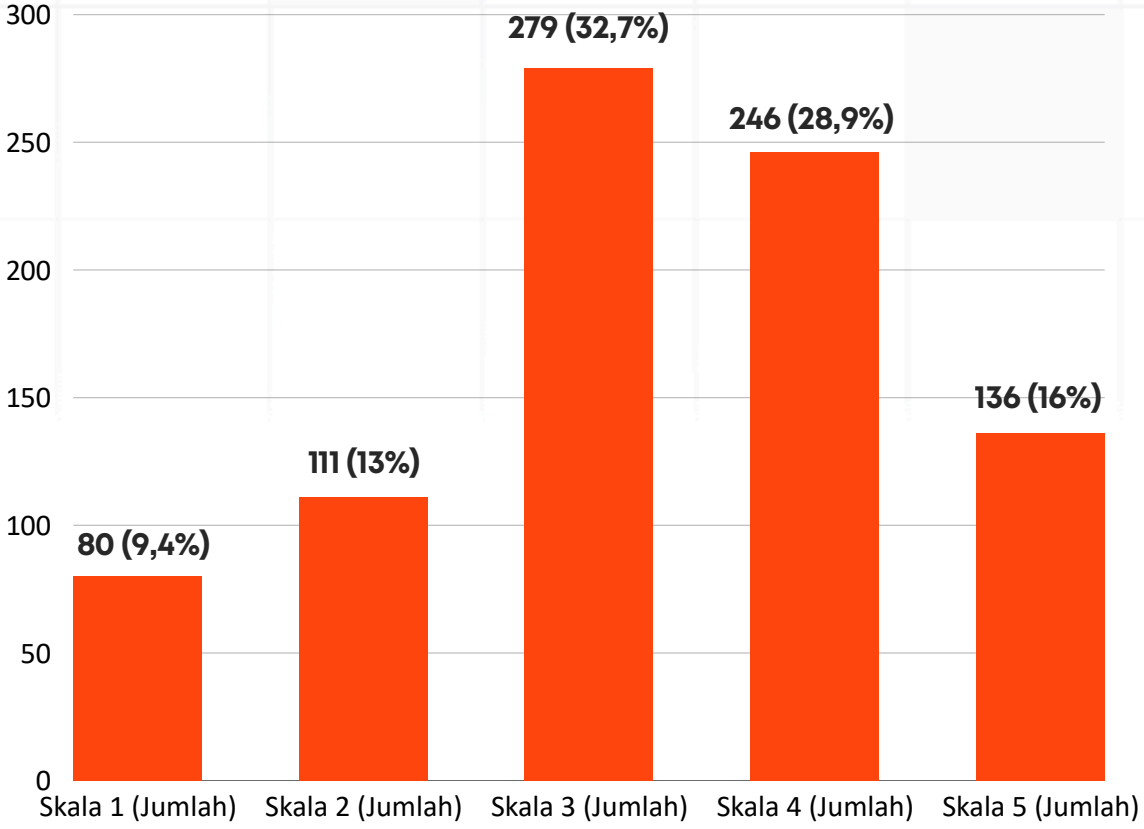

Program Sekolah Nasional Terintegrasi setiap Kabupaten/Kota menempati peringkat ke-5 dari 15 program prioritas dengan skor rata-rata (mean) 3,28 dari 5,00, didukung oleh akumulasi sentimen positif sebesar 44,6% (369 responden) terdiri dari 28,5% (236 responden) yang menilai Baik dan 16,1% (133 responden) menilai Sangat Baik meski diwarnai sentimen negatif sebesar 22,9% (189 responden) serta porsi netral yang mendominasi sebesar 32,6% (270 responden). Respons positif publik terdidik ini mencerminkan dukungan terhadap upaya standarisasi mutu pendidikan dan pemerataan infrastruktur sekolah di tingkat daerah, sebagaimana terkonfirmasi dari tingkat ketidaktepatan sasaran yang sangat rendah (6,76%). Kendati demikian, tingginya proporsi penilai netral memberi sinyal krisis kepercayaan terhadap efisiensi eksekusi di lapangan, di mana publik mengkhawatirkan terjadinya tumpang tindih fungsi *(fiscal overlap)* dengan fasilitas pendidikan eksis di daerah, sehingga pemerintah didorong untuk mengedepankan skema integrasi dan peningkatan mutu sekolah yang sudah ada ketimbang memperbesar proyek pembangunan fisik baru.

PSKP
Pusat Studi Kebijakan Publik

Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda

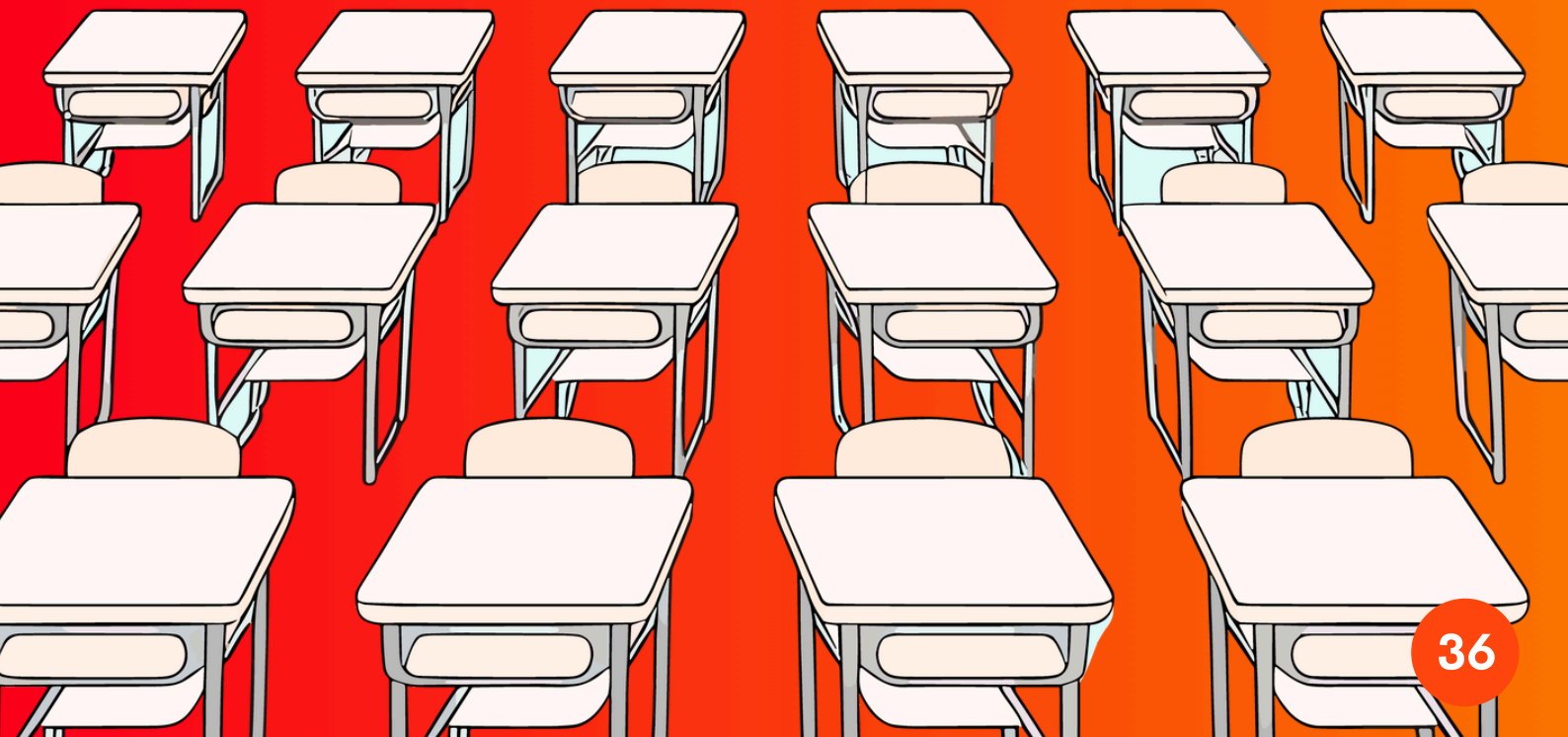

SMA Unggul Garuda

Responden ditanyakan "Sejauh mana Anda merasakan dampak atau kebermanfaatan dari program SMA Unggul Garuda?" (Keterangan skala: 1 = Sangat Tidak Berdampak/Sangat Buruk hingga 5 = Sangat Berdampak/Sangat Baik)

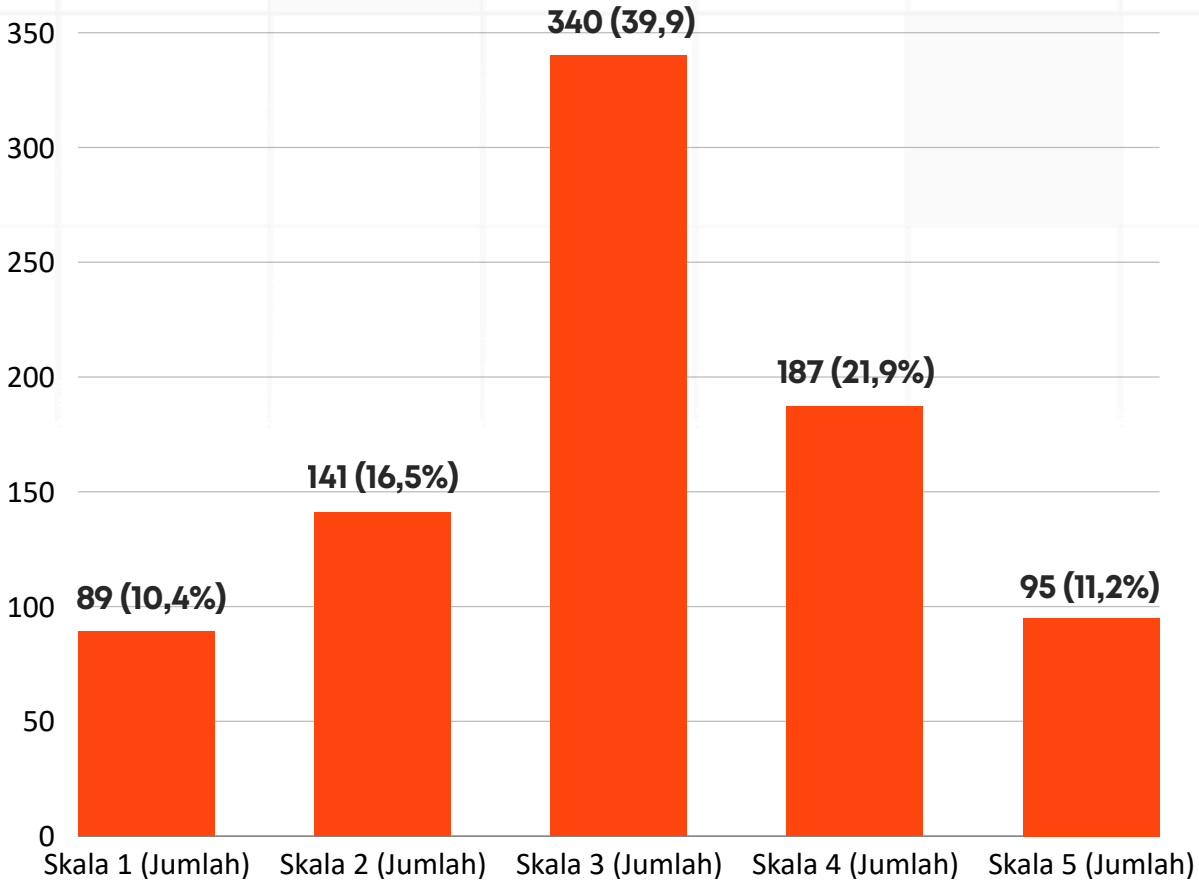

Program SMA Unggul Garuda menempati peringkat ke-7 dari 15 program prioritas dengan skor rata-rata *(mean)* 3,06 dari 5,00, yang didominasi oleh kelompok penilai netral sebesar 39,4% (326 responden), akumulasi sentimen positif sebesar 33,2% (275 responden) terdiri dari 21,9% (181 responden) yang menilai Baik dan 11,4% (94 responden) menilai Sangat Baik serta sentimen negatif sebesar 27,4% (227 responden; 10,7% Sangat Buruk dan 16,7% Buruk). Posisi nilai yang berada tepat di ambang batas netralitas ini mencerminkan ambivalensi dan skeptisisme publik terdidik terhadap pembentukan institusi sekolah eksklusif, yang dinilai berpotensi memicu kastaisasi sosial pendidikan dan mengalokasikan anggaran negara secara tidak merata. Temuan ini merekomendasikan agar pemerintah mengevaluasi ulang urgensi ekspansi unit sekolah unggulan baru dan meredistribusikan alokasi APBN untuk peningkatan kualitas sarana, infrastruktur, serta kompetensi guru di SMA reguler secara proporsional.

PSKP
Pusat Studi Kebijakan Publik

Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat

Responden ditanyakan "Sejauh mana Anda merasakan dampak atau kebermanfaatan dari program Sekolah Rakyat?" (Keterangan skala: 1 = Sangat Tidak Berdampak/Sangat Buruk hingga 5 = Sangat Berdampak/Sangat Baik)

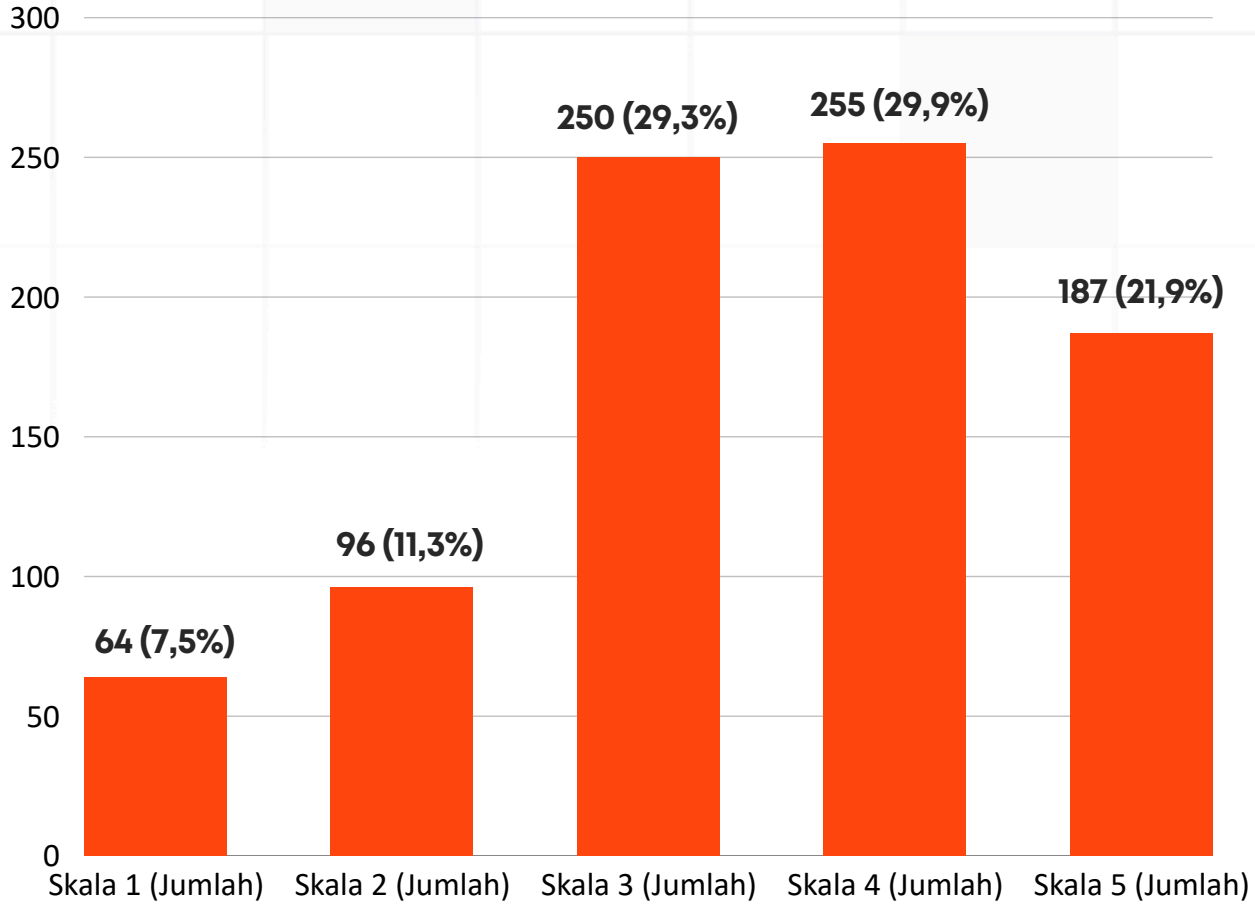

Program Sekolah Rakyat meraih peringkat ke-3 dari 15 program prioritas dengan skor rata-rata *(mean)* 3,48 dari 5,00, didukung oleh akumulasi sentimen positif publik terdidik sebesar 52,3% (433 responden) yang terdiri dari 30,2% (250 responden) yang menilai Baik dan 22,1% (183 responden) menilai Sangat Baik serta diwarnai sentimen negatif yang relatif rendah sebesar 18,7% (155 responden; 7,6% Sangat Buruk dan 11,1% Buruk) dan kelompok netral sebesar 29,0% (240 responden). Tingginya tingkat kepuasan ini mencerminkan penerimaan publik yang kuat terhadap instrumen jaring pengaman sosial pendidikan *(social safety net in education)*, di mana intervensi langsung pada anak-anak dari kelompok marjinal dinilai berkeadilan redistributif dan memiliki tingkat ketidaktepatan sasaran yang rendah (8,57%) dibandingkan pembuatan proyek kelembagaan baru yang eksklusif. Temuan ini merekomendasikan pemerintah untuk menginstitusionalisasikan skema Sekolah Rakyat ke dalam sistem penganggaran APBN yang berkelanjutan agar tidak terpengaruh oleh dinamika politik komando pusat.

PSKP
Pusat Studi Kebijakan Publik

Cek Kesehatan Gratis

Cek Kesehatan Gratis

Responden ditanyakan "Sejauh mana Anda merasakan dampak atau kebermanfaatan dari program Cek Kesehatan Gratis?" (Keterangan skala: 1 = Sangat Tidak Berdampak/Sangat Buruk hingga 5 = Sangat Berdampak/Sangat Baik)

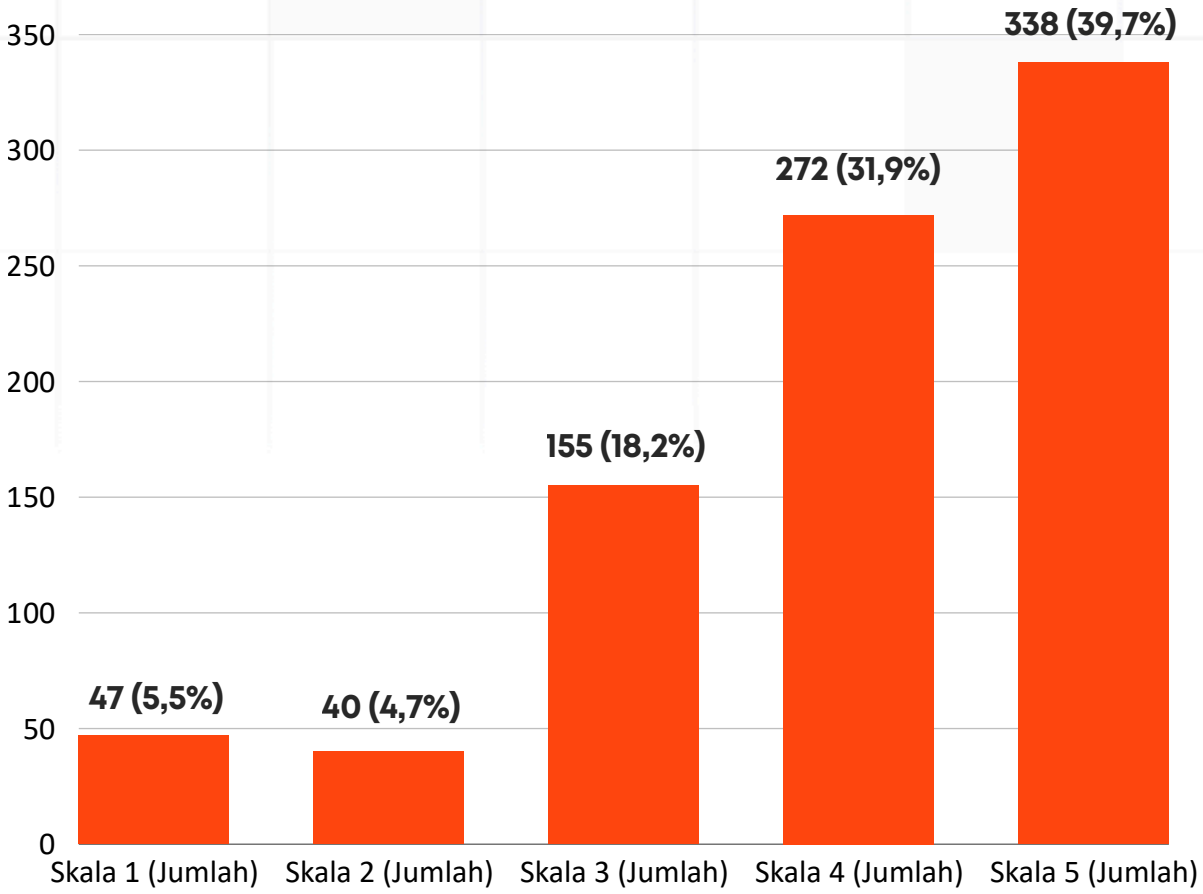

Program Cek Kesehatan Gratis berhasil memuncaki peringkat ke-1 dari 15 program prioritas dengan skor rata-rata *(mean)* 3,95 dari 5,00, didukung oleh dominasi sentimen positif publik terdidik yang sangat tinggi mencapai 71,5% (592 responden) terdiri dari 31,9% (264 responden) yang menilai Baik dan 39,6% (328 responden) menilai Sangat Baik serta sentimen negatif yang sangat minim sebesar 10,2% (84 responden; 5,7% Sangat Buruk dan 4,5% Buruk) dan kelompok netral sebesar 18,4% (152 responden). Pencapaian tertinggi ini menegaskan keberhasilan program sebagai bentuk ideal pelayanan dasar universal *(Universal Basic Services),* di mana penyediaan akses kesehatan preventif yang bebas dari hambatan birokrasi terbukti secara langsung mereduksi beban biaya hidup masyarakat *(cost-of-living relief)* sekaligus mencatatkan tingkat ketidaktepatan sasaran terendah secara nasional (5,80%). Temuan ini merekomendasikan pemerintah untuk menjadikan program ini sebagai pilar utama belanja sosial APBN dan memperluas kapasitas operasionalnya hingga ke tingkat Puskesmas dan Posyandu di kawasan 3T.

PSKP
Pusat Studi Kebijakan Publik

Koperasi Desa Merah Putih

Koperasi Desa Merah Putih

Responden ditanyakan "Sejauh mana Anda merasakan dampak atau kebermanfaatan dari program Koperasi Desa Merah Putih?" (Keterangan skala: 1 = Sangat Tidak Berdampak/Sangat Buruk hingga 5 = Sangat Berdampak/Sangat Baik)

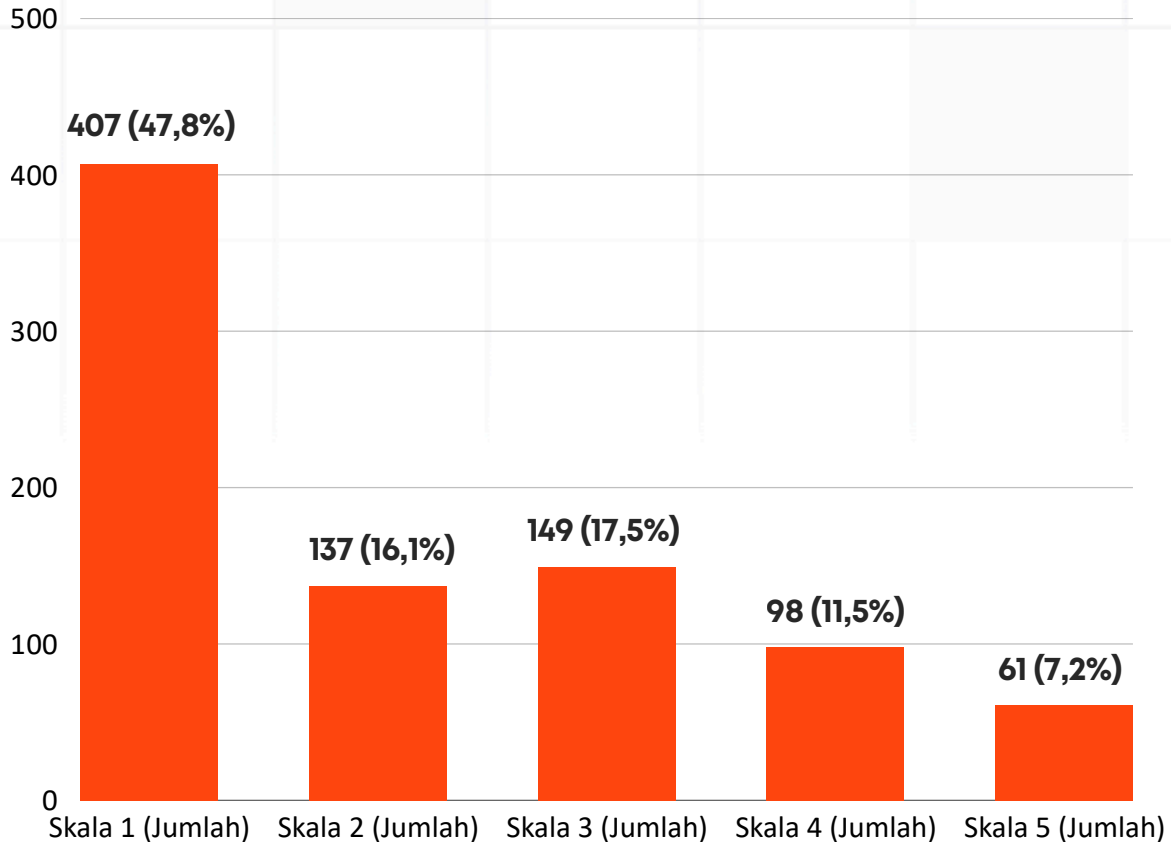

Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terpuruk di peringkat ke-14 dari 15 program prioritas dengan skor rata-rata *(mean)* 2,15 dari 5,00, akibat dominasi sentimen negatif publik terdidik yang sangat masif mencapai 63,5% (526 responden) terdiri dari 47,3% (392 responden) yang menilai Sangat Buruk dan 16,2% (134 responden) menilai Buruk serta hanya mencatatkan sentimen positif sebesar 18,7% (155 responden; 11,5% Baik dan 7,2% Sangat Baik) dan kelompok netral sebesar 17,8% (147 responden). Penolakan tajam ini selaras dengan posisi program ini sebagai kebijakan paling tidak tepat sasaran secara nasional (59,06%), akibat pendekatan pembentukan kelembagaan desa secara komando *(top-down institutional injection)* yang dinilai sangat rawan dikuasai oleh elit lokal *(elite capture)* serta berisiko memboroskan APBN tanpa menyentuh kebutuhan permodalan riil petani dan pelaku usaha mikro di desa. Temuan ini merekomendasikan pemerintah untuk menghentikan pembentukan wadah KDKMP baru dan mengalihkan alokasi anggarannya untuk penguatan BUMDes yang sudah aktif serta perluasan skema kredit usaha mikro yang berbasis komunitas.

PSKP
Pusat Studi Kebijakan Publik

Cetak Sawah Baru

Cetak Sawah Baru

Responden ditanyakan "Sejauh mana Anda merasakan dampak atau kebermanfaatan dari program Cetak Sawah Baru?" (Keterangan skala: 1 = Sangat Tidak Berdampak/Sangat Buruk hingga 5 = Sangat Berdampak/Sangat Baik)

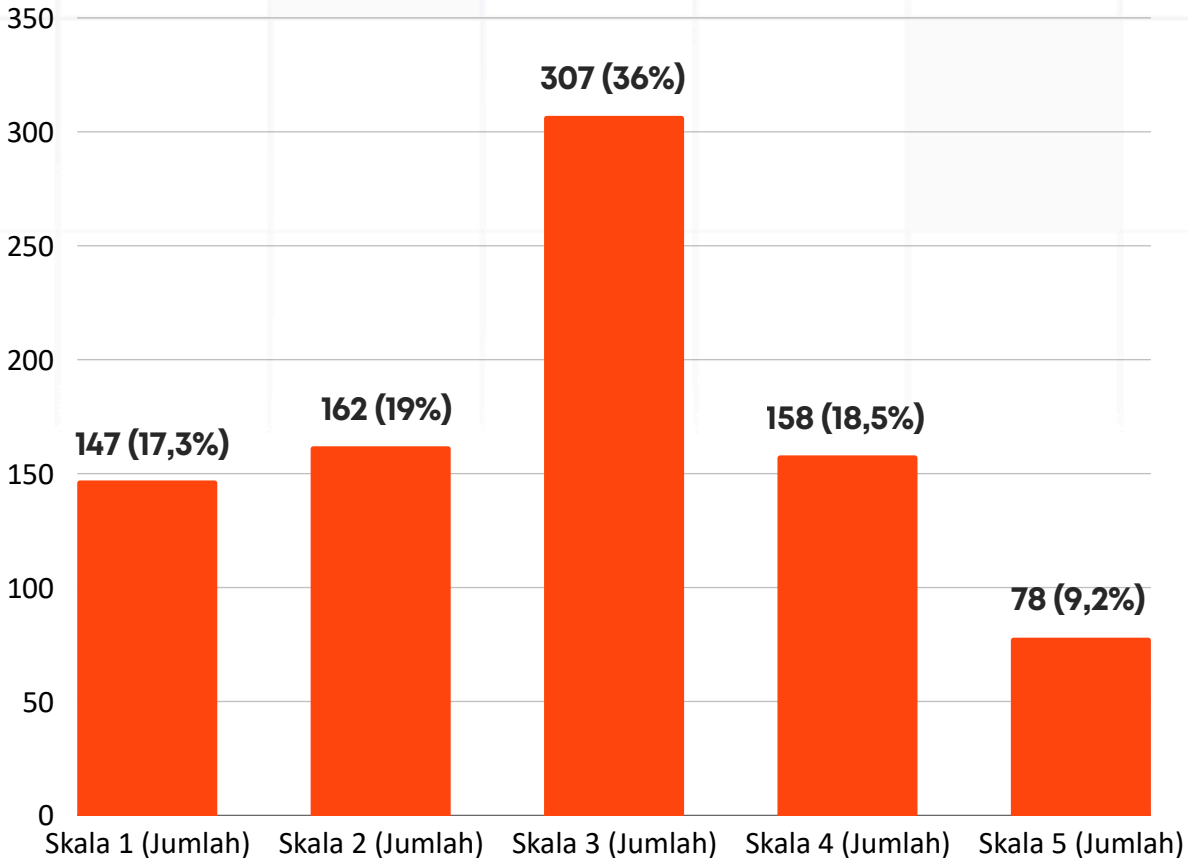

Program Cetak Sawah Baru berada di zona merah penilaian kinerja dengan menempati peringkat ke-9 dari 15 program prioritas dan mencatatkan skor rata-rata (mean) 2,84 dari 5,00, akibat dominasi kelompok penilai netral sebesar 36,0% (298 responden) serta akumulasi sentimen negatif sebesar 35,9% (297 responden; 17,3% Sangat Buruk dan 18,6% Buruk) yang melampaui porsi sentimen positif sebesar 28,1% (233 responden; 18,7% Baik dan 9,4% Sangat Baik). Rendahnya kepuasan publik ini mencerminkan skeptisisme masif publik terdidik terhadap pendekatan *food estate* skala besar yang dinilai riskan mengulang kegagalan masa lalu akibat potensi kerusakan ekologis, marjinalisasi hak tanah lokal, dan ketidakpastian produktivitas hasil panen. Temuan yang selaras dengan tingkat ketidaktepatan sasaran sebesar 12,92% ini merekomendasikan pemerintah untuk memberlakukan moratorium proyek pencetakan lahan baru dan mengalihkan alokasi APBN untuk pemulihan infrastruktur irigasi yang rusak serta penyediaan subsidi input pertanian secara langsung kepada petani gurem.

PSKP
Pusat Studi Kebijakan Publik

Kemandirian Energi dan Air

Kemandirian Energi dan Air

Responden ditanyakan "Sejauh mana Anda merasakan dampak atau kebermanfaatan dari program Kemandirian Energi dan Air?" (Keterangan skala: 1 = Sangat Tidak Berdampak/Sangat Buruk hingga 5 = Sangat Berdampak/Sangat Baik)

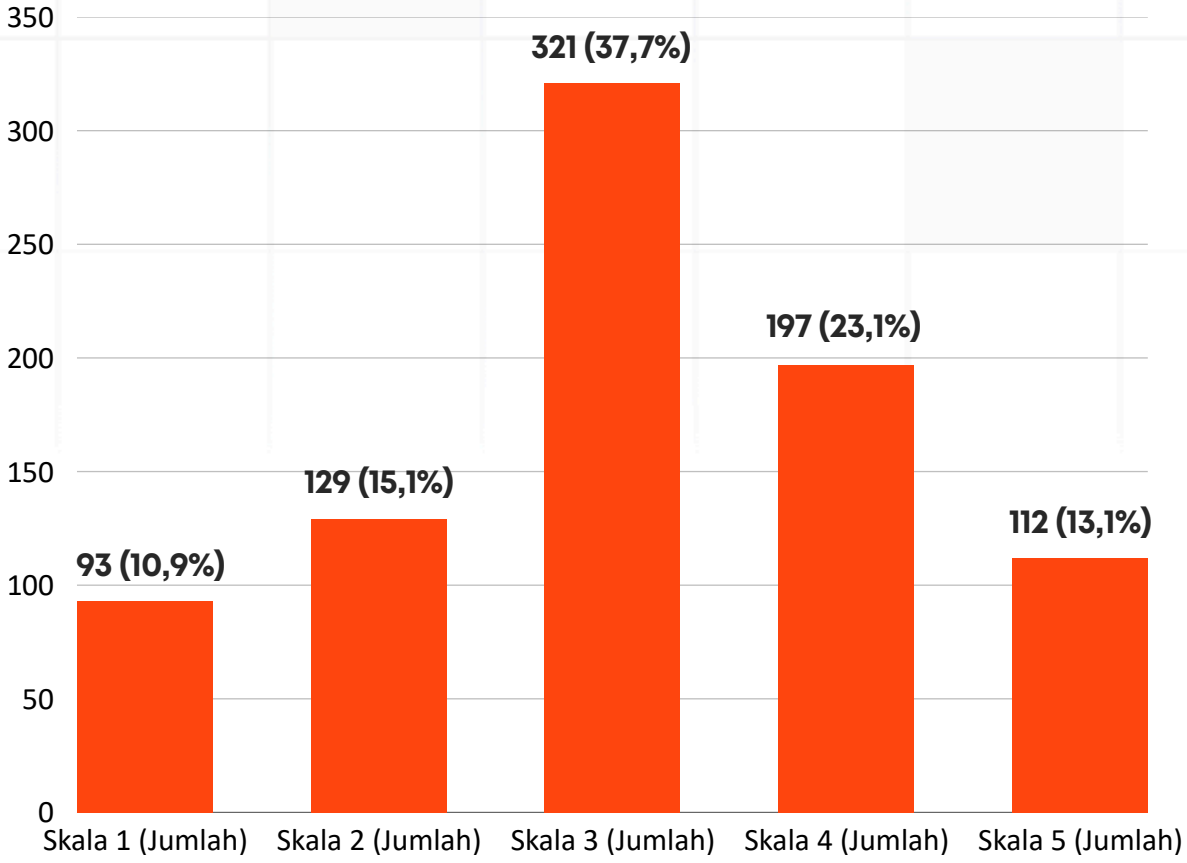

Program Kemandirian Energi dan Air menempati peringkat ke-6 dari 15 program prioritas dengan skor rata-rata (mean) 3,13 dari 5,00, didominasi oleh kelompok penilai netral sebesar 37,6% (311 responden), akumulasi sentimen positif sebesar 36,5% (302 responden; 23,1% Baik dan 13,4% Sangat Baik), serta sentimen negatif sebesar 26,0% (215 responden; 11,1% Sangat Buruk dan 14,9% Buruk). Skor kinerja yang moderat di atas batas netralitas ini berbanding lurus dengan tingkat ketidaktepatan sasaran yang sangat rendah (6,76%), mengindikasikan bahwa pemenuhan akses energi dan air bersih lokal dinilai tepat sasaran serta terhindar dari risiko kebocoran alokasi APBN (*mis-targeting)*. Kendati demikian, tingginya porsi jawaban netral memberikan sinyal bahwa implementasi proyek ini masih terfragmentasi dan belum terakselerasi dalam skala masif di tingkat tapak, sehingga dampaknya belum dirasakan secara meluas oleh masyarakat. Temuan ini merekomendasikan pemerintah untuk mengalihkan alokasi subsidi energi regresif ke dalam skema pembiayaan infrastruktur energi terbarukan dan penyediaan sarana air bersih berbasis komunitas secara langsung.

PSKP
Pusat Studi Kebijakan Publik

Kampung Nelayan Merah-Putih

Kampung Nelayan Merah-Putih

Responden ditanyakan "Sejauh mana Anda merasakan dampak atau kebermanfaatan dari program Kampung Nelayan Merah-Putih?" (Keterangan skala: 1 = Sangat Tidak Berdampak/Sangat Buruk hingga 5 = Sangat Berdampak/Sangat Baik)

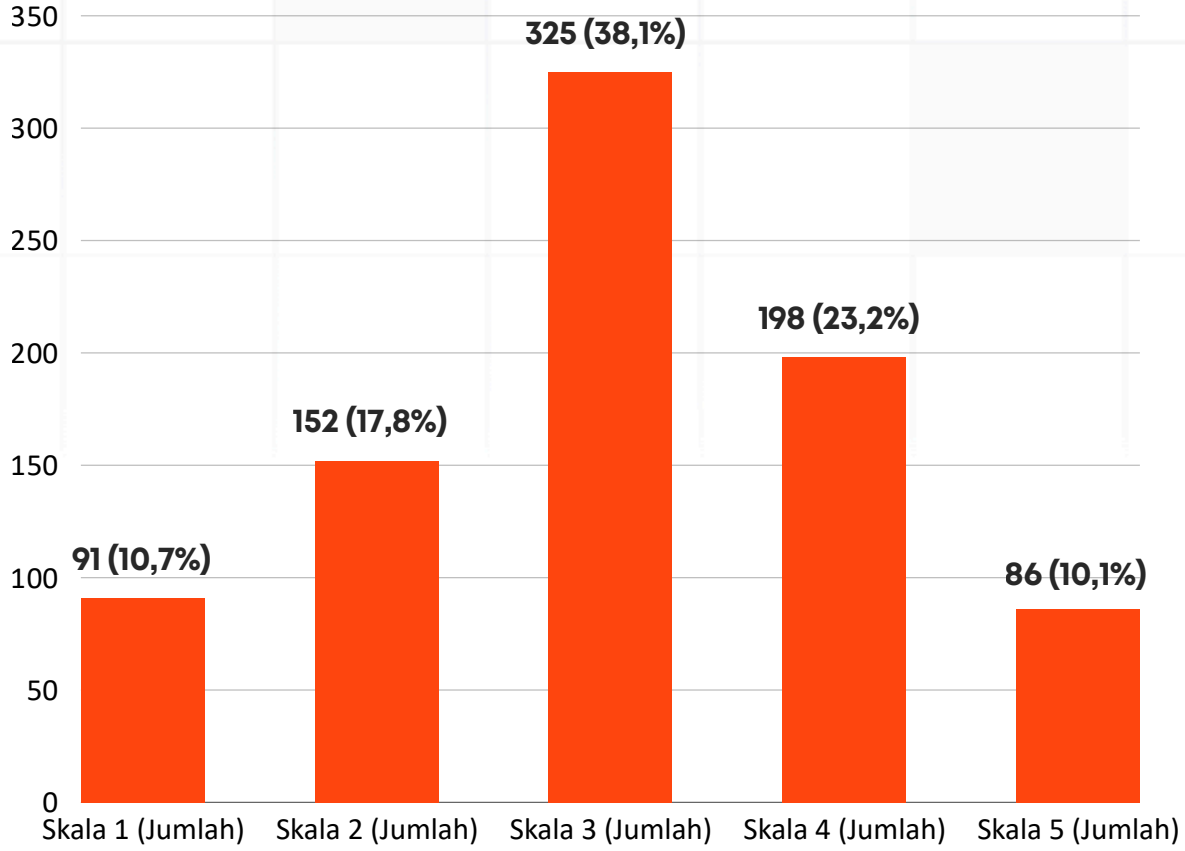

Program Kampung Nelayan Merah-Putih menempati peringkat ke-8 dari 15 program prioritas dengan skor rata-rata *(mean)* 3,04 dari 5,00, yang didominasi oleh kelompok penilai netral sebesar 38,2% (316 responden), akumulasi sentimen positif sebesar 33,0% (273 responden; 22,6% Baik dan 10,4% Sangat Baik), serta sentimen negatif sebesar 28,9% (239 responden; 10,9% Sangat Buruk dan 18,0% Buruk). Skor kinerja yang berada sedikit di atas ambang batas netralitas ini selaras dengan tingkat ketidaktepatan sasaran yang relatif rendah (7,49%), mengindikasikan bahwa alokasi intervensi fisik pada kelompok marjinal pesisir dinilai tepat sasaran dan berpotensi mereduksi ketimpangan wilayah. Kendati demikian, dominasi pilihan netral mencerminkan keraguan publik terdidik terhadap jangkauan eksekusi di lapangan yang masih terfragmentasi, di mana pembenahan fasilitas fisik dinilai belum terintegrasi utuh dengan penguatan rantai pasok dan perlindungan harga tangkapan nelayan tradisional. Temuan ini merekomendasikan pemerintah untuk mentransformasikan skema program dari sekadar revitalisasi fisik menjadi penguatan ekosistem maritim terpadu, termasuk jaminan kepastian akses Solar bersubsidi tepat sasaran dan penyediaan rantai dingin *(cold chain)* berbasis komunitas lokal.

PSKP
Pusat Studi Kebijakan Publik

Digitalisasi Pendidikan

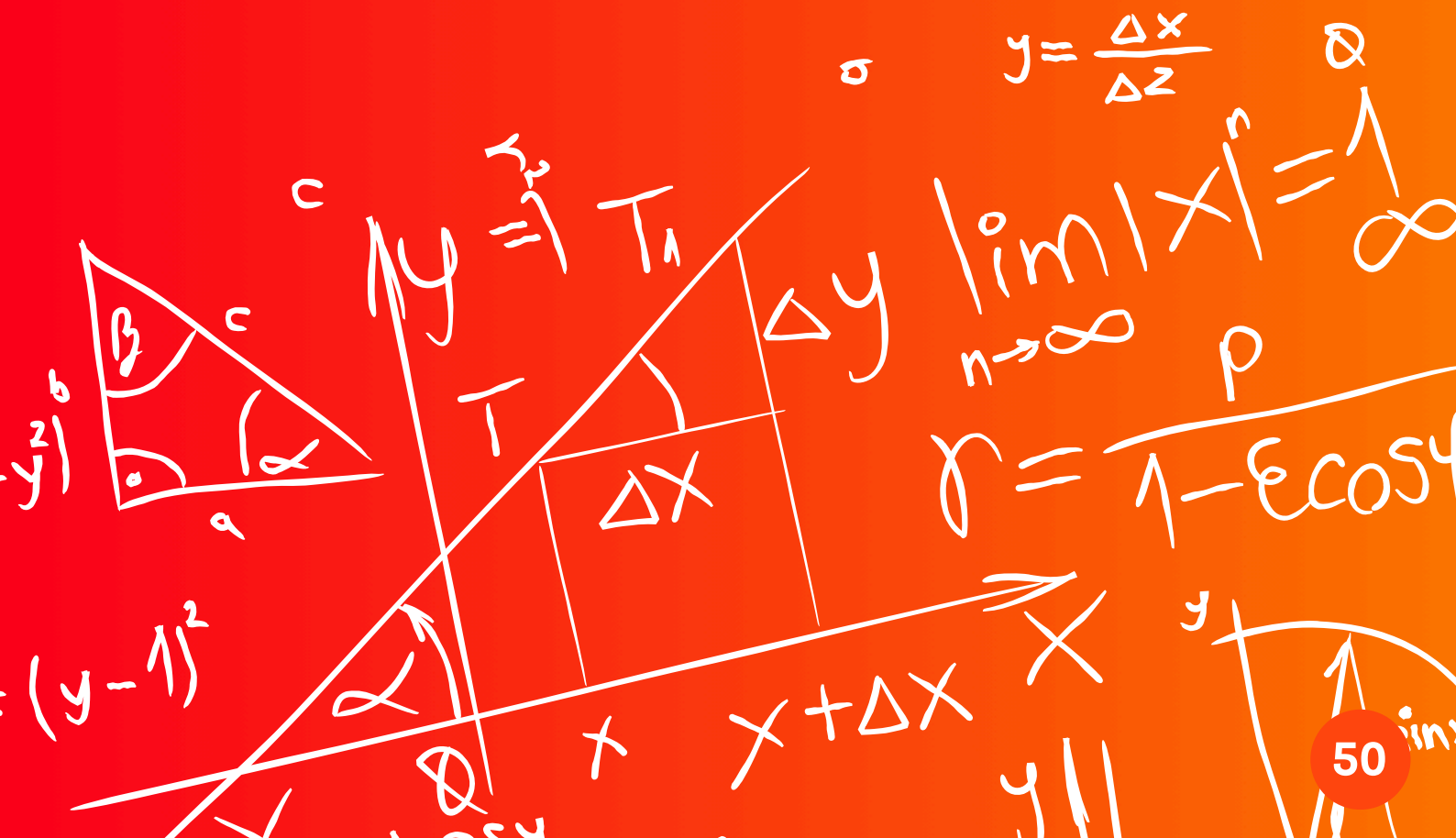

Digitalisasi Pendidikan

Responden ditanyakan "Sejauh mana Anda merasakan dampak atau kebermanfaatan dari program Digitalisasi Pendidikan?" (Keterangan skala: 1 = Sangat Tidak Berdampak/Sangat Buruk hingga 5 = Sangat Berdampak/Sangat Baik)

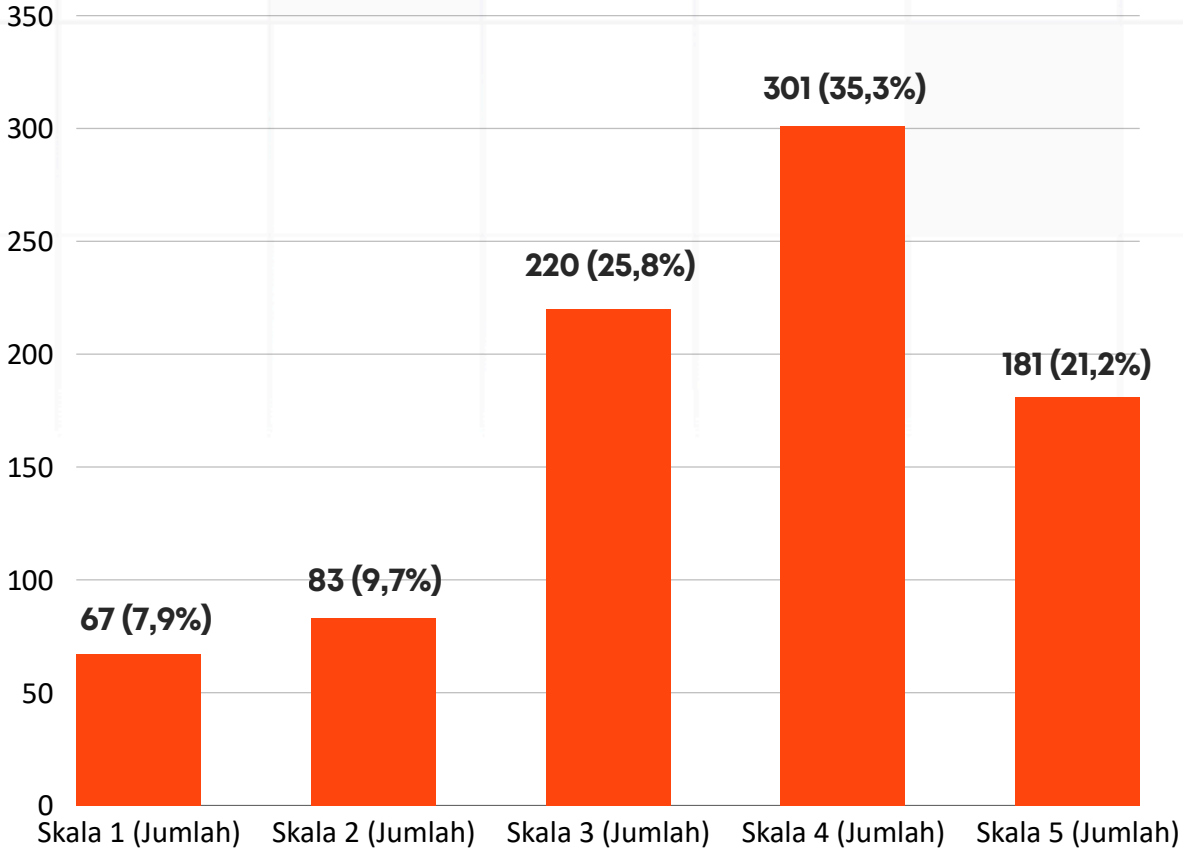

Program Digitalisasi Pendidikan mengamankan posisi *runner-up* di peringkat ke-2 dari 15 program prioritas dengan skor rata-rata *(mean)* 3,50 dari 5,00, didukung oleh dominasi sentimen positif publik terdidik sebesar 55,5% (460 responden) terdiri dari 35,0% (290 responden) yang menilai Baik dan 20,5% (170 responden) menilai Sangat Baik serta diwarnai sentimen negatif yang relatif rendah sebesar 18,0% (149 responden; 8,1% Sangat Buruk dan 9,9% Buruk) dan kelompok netral sebesar 26,4% (219 responden). Tingginya apresiasi ini sejalan dengan posisi program sebagai salah satu kebijakan dengan tingkat ketidaktepatan sasaran paling rendah secara nasional (6,64%), yang mengindikasikan bahwa penyediaan sarana teknologi dan akses digital dinilai publik berdampak langsung serta mudah diverifikasi secara konkret di tingkat sekolah. Kendati demikian, guna mencegah memperlebar jurang ketimpangan digital *(digital divide),* pemerintah direkomendasikan untuk memfokuskan alokasi belanja digitalisasi pada pemerataan infrastruktur jaringan dan perangkat belajar di sekolah-sekolah kawasan 3T ketimbang pengadaan yang bersifat homogen di area perkotaan.

PSKP
Pusat Studi Kebijakan Publik

Tiga Juta Rumah per Tahun

Tiga Juta Rumah per Tahun

Responden ditanyakan "Sejauh mana Anda merasakan dampak atau kebermanfaatan dari program Tiga Juta Rumah Pertahun?" (Keterangan skala: 1 = Sangat Tidak Berdampak/Sangat Buruk hingga 5 = Sangat Berdampak/Sangat Baik)

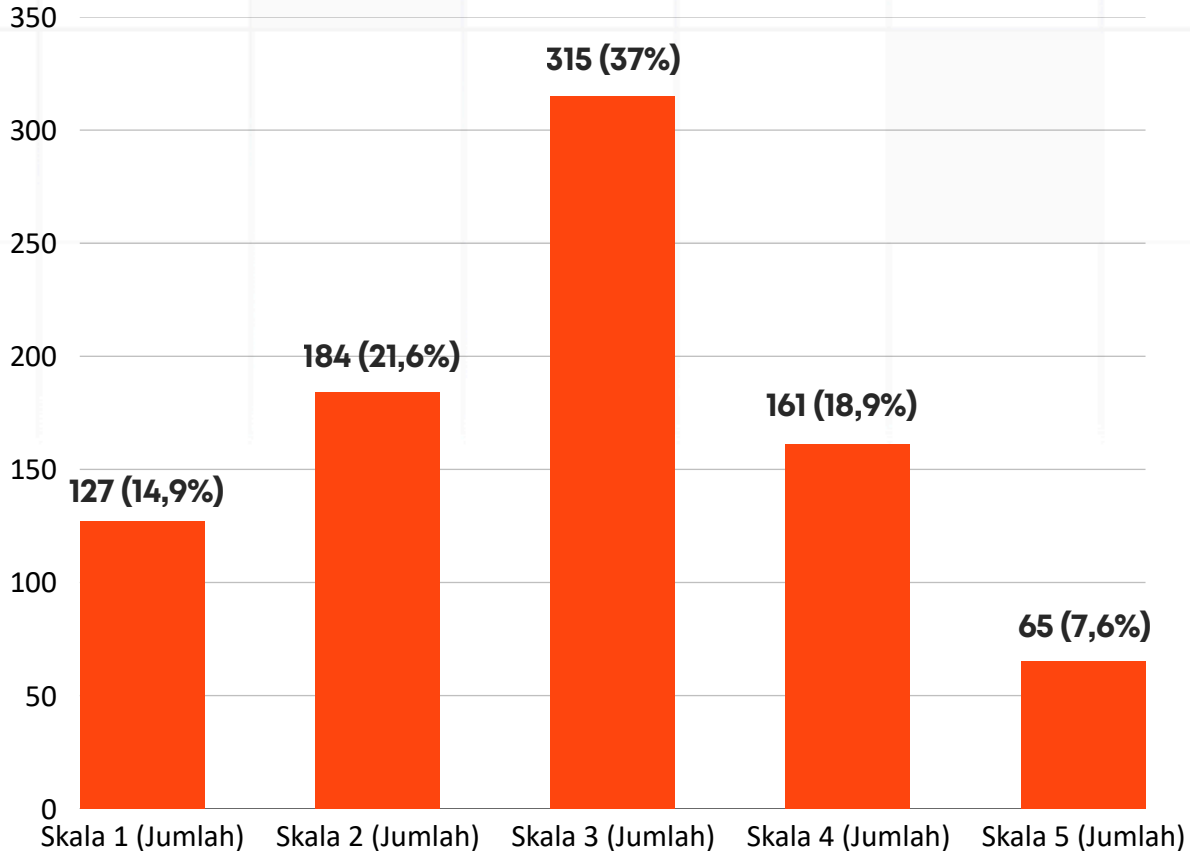

Program 3 Juta Rumah Per Tahun berada di zona merah penilaian kinerja dengan menempati peringkat ke-10 dari 15 program prioritas dan mencatatkan skor rata-rata *(mean)* 2,81 dari 5,00, yang didominasi oleh kelompok penilai netral sebesar 37,2% (308 responden) serta akumulasi sentimen negatif sebesar 36,9% (306 responden; 15,2% Sangat Buruk dan 21,7% Buruk) yang melampaui porsi sentimen positif sebesar 25,9% (214 responden; 18,4% Baik dan 7,5% Sangat Baik). Rendahnya tingkat kepuasan publik ini selaras dengan tingginya persepsi ketidaktepatan sasaran yang mencapai 20,65% (Peringkat 5 Paling Tidak Tepat Sasaran), mengindikasikan kekhawatiran masif publik terdidik dan generasi muda *(housing affordability crisis)* bahwa skema pembangunan fisik masif ini berisiko dinikmati oleh spekulan properti atau kelompok menengah ke atas ketimbang Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pekerja muda. Temuan ini merekomendasikan pemerintah untuk mengalihkan fokus kebijakan dari sekadar mengejar target kuantitatif kepemilikan rumah komersial menuju penyediaan hunian sewa terjangkau *(social/public housing)* yang terintegrasi dengan akses transportasi publik (TOD) di pusat perkotaan.

PSKP
Pusat Studi Kebijakan Publik

Kenaikan Gaji Hakim

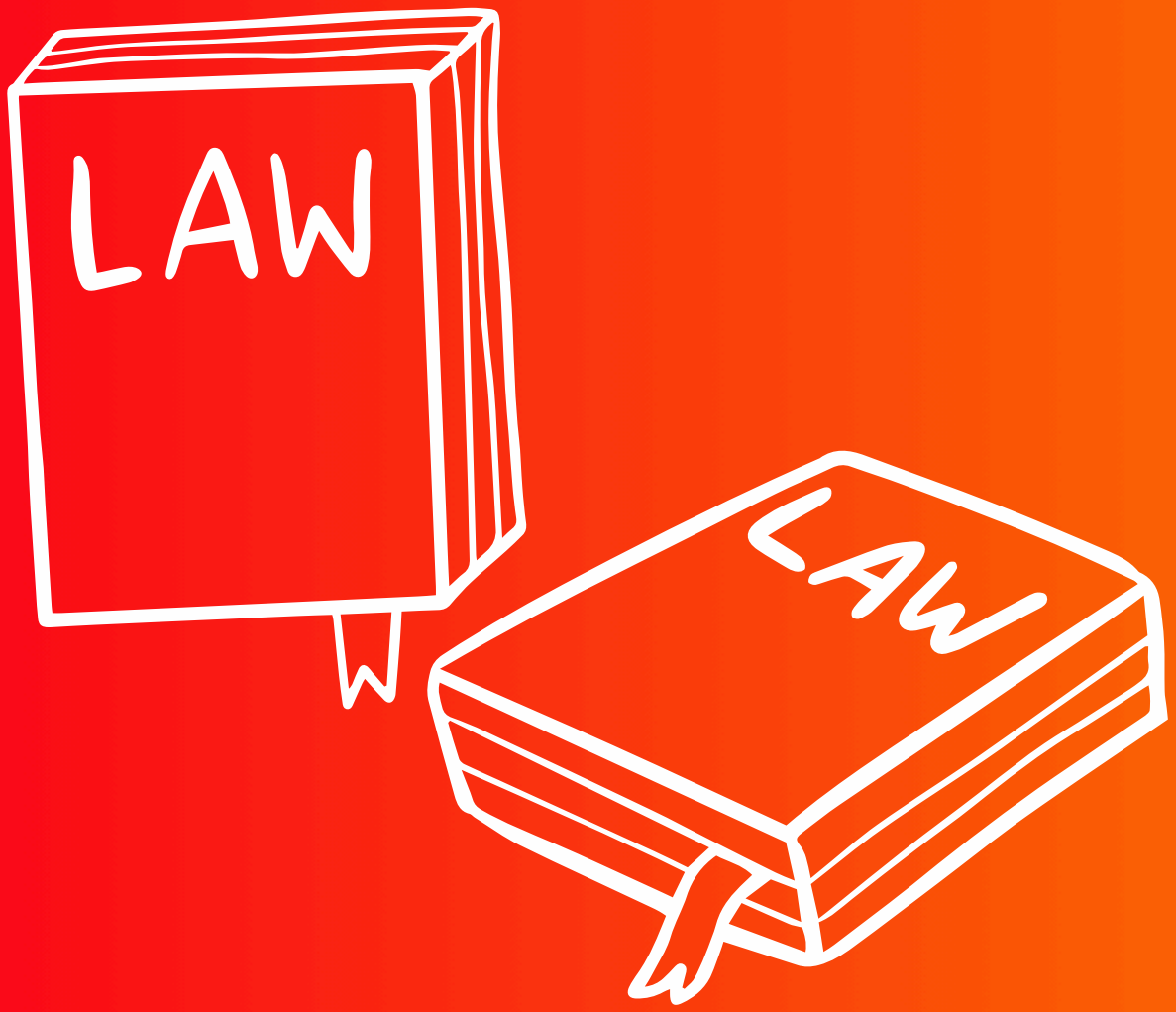

Kenaikan Gaji Hakim

Responden ditanyakan "Sejauh mana Anda merasakan dampak atau kebermanfaatan dari program Kenaikan Gaji Hakim?" (Keterangan skala: 1 = Sangat Tidak Berdampak/Sangat Buruk hingga 5 = Sangat Berdampak/Sangat Baik)

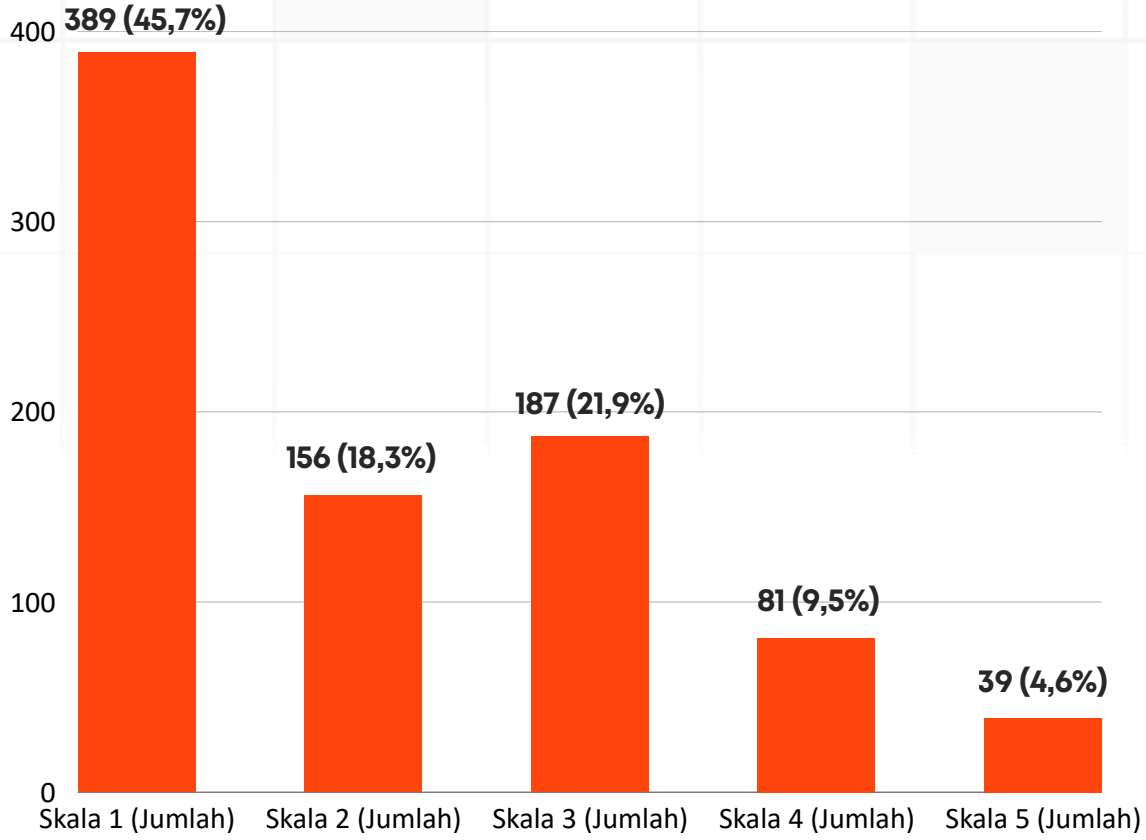

Program Kenaikan Gaji Hakim terperosok ke peringkat terbawah (peringkat ke-15 dari 15 program prioritas) dengan mencatatkan skor rata-rata *(mean)* terendah sebesar 2,09 dari 5,00, akibat penolakan masif dari publik terdidik melalui akumulasi sentimen negatif yang mencapai 63,9% (529 responden) terdiri dari 45,8% (379 responden) yang menilai Sangat Buruk dan 18,1% (150 responden) menilai Buruk serta hanya disokong sentimen positif sebesar 14,0% (116 responden; 9,3% Baik dan 4,7% Sangat Baik) dan kelompok netral sebesar 22,1% (183 responden). Penolakan tajam ini mencerminkan resistensi publik terhadap kebijakan penyesuaian kesejahteraan pejabat publik yang terisolasi dari reformasi akuntabilitas peradilan, di mana kenaikan remunerasi dinilai sebagai bentuk alokasi anggaran yang regresif dan kian memperlebar ketimpangan pendapatan *(wage inequality)* tanpa adanya jaminan peningkatan integritas serta pembenahan kelembagaan di tubuh yudikatif. Temuan ini merekomendasikan pemerintah untuk membekukan skema kenaikan tunjangan otomatis dan mengaitkan setiap penyesuaian kesejahteraan penegak hukum secara ketat dengan capaian indikator kinerja utama (KPI), transparansi LHKPN, serta pembenahan mekanisme pengawasan independen terhadap penanganan perkara.

PSKP
Pusat Studi Kebijakan Publik

Komponen Cadangan Tentara Nasional Indonesia

Komponen Cadangan Tentara Nasional Indonesia

Responden ditanyakan "Sejauh mana Anda merasakan dampak atau kebermanfaatan dari program Komponen Cadangan Tentara Nasional Indonesia?" (Keterangan skala: 1 = Sangat Tidak Berdampak/Sangat Buruk hingga 5 = Sangat Berdampak/Sangat Baik)

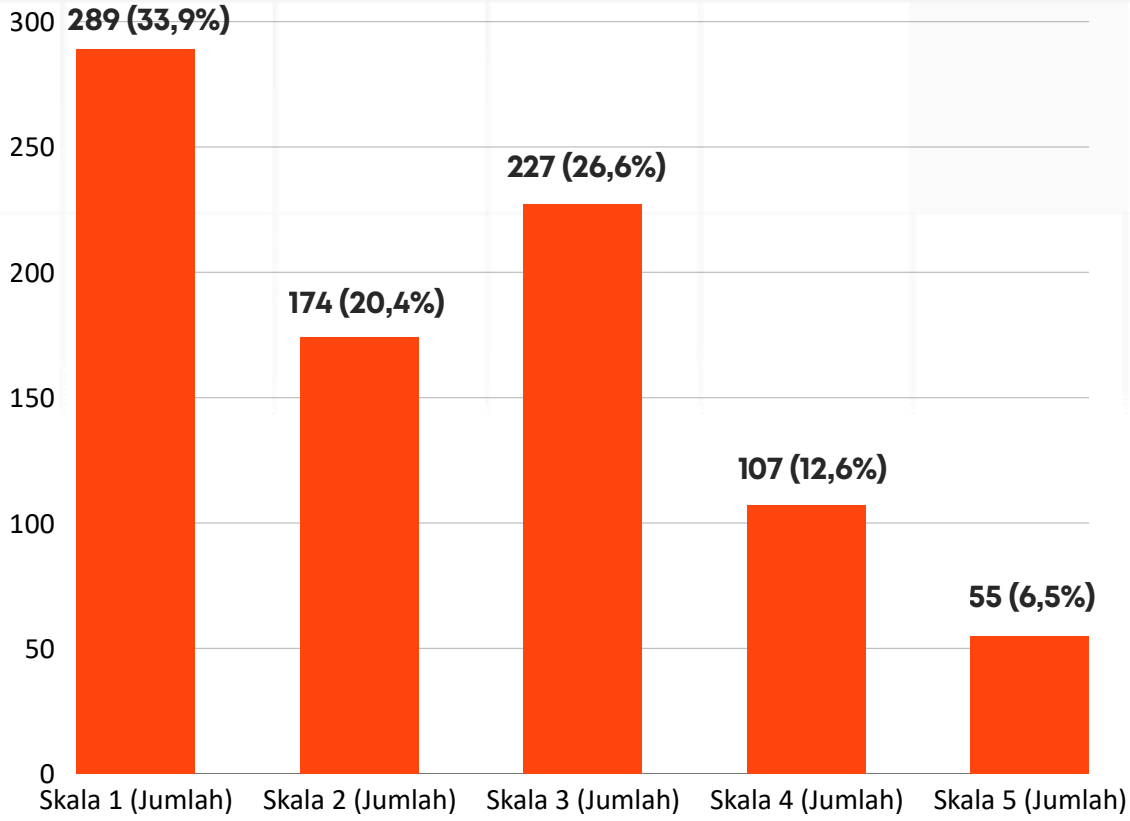

Program Komponen Cadangan TNI (Komcad) terpuruk di peringkat ke-13 dari 15 program prioritas dengan mencatatkan skor rata-rata *(mean)* sebesar 2,38 dari 5,00, akibat masifnya sentimen negatif dari publik terdidik yang mencapai 54,0% (447 responden) terdiri dari 33,8% (280 responden) yang menilai Sangat Buruk dan 20,2% (167 responden) menilai Buruk serta hanya disokong oleh sentimen positif sebesar 19,3% (160 responden; 12,7% Baik dan 6,6% Sangat Baik) dan kelompok netral sebesar 26,7% (221 responden). Penolakan yang cukup tajam ini mencerminkan tingginya skeptisisme publik terhadap efisiensi dan urgensi alokasi anggaran sektor pertahanan bernuansa sekuritisasi fisik, di mana program pelatihan militer sipil dinilai sebagai bentuk pemborosan APBN *(fiscal inefficiency)* yang mengalihkan fokus pembiayaan dari pelayanan dasar universal *(Universal Basic Services)* serta kebutuhan modernisasi Alutsista utama. Temuan ini merekomendasikan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta moratorium ekspansi program Komcad, lalu meredistribusikan alokasi anggarannya untuk penguatan kapabilitas pertahanan siber nasional dan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI aktif.

Universitas Republik Indonesia

Universitas Republik Indonesia

Responden ditanyakan "Sejauh mana Anda merasakan dampak atau kebermanfaatan dari program Universitas Republik Indonesia?" (Keterangan skala: 1 = Sangat Tidak Berdampak/Sangat Buruk hingga 5 = Sangat Berdampak/Sangat Baik)

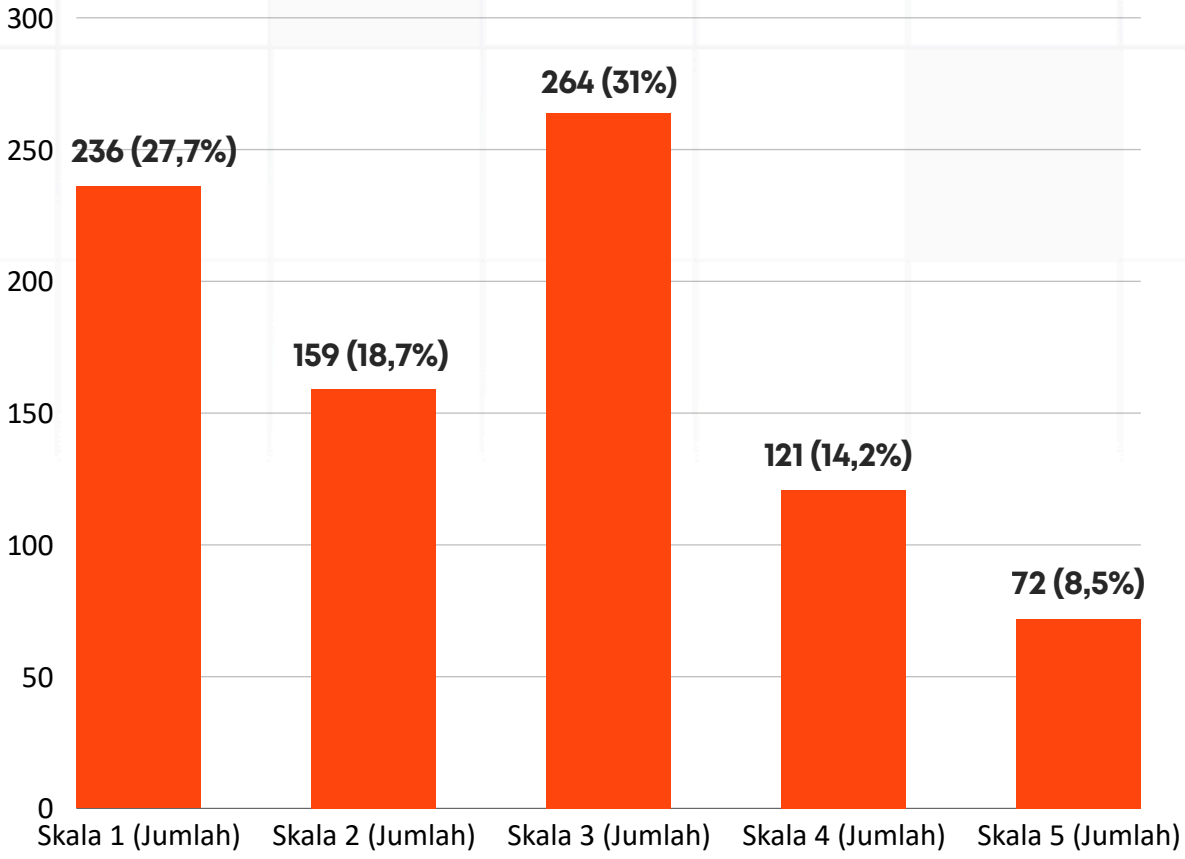

Program Universitas Republik Indonesia (URI) terperosok ke zona merah penilaian kinerja dengan menempati peringkat ke-11 dari 15 program prioritas dan mencatatkan skor rata-rata *(mean)* sebesar 2,58 dari 5,00, akibat didominasi oleh akumulasi sentimen negatif dari publik terdidik sebesar 45,9% (380 responden) terdiri dari 27,4% (227 responden) yang menilai Sangat Buruk dan 18,5% (153 responden) menilai Buruk serta porsi netral sebesar 31,4% (260 responden) dan hanya disokong sentimen positif sebesar 22,7% (188 responden; 14,0% Baik dan 8,7% Sangat Baik). Rendahnya apresiasi publik ini mencerminkan resistensi masif komunitas akademis terhadap pendirian institusi pendidikan tinggi baru berlabel negara yang dinilai memicu tumpang tindih fungsi *(fiscal redundancy)* serta memboroskan APBN di tengah krisis pembiayaan perguruan tinggi eksis. Temuan ini menegaskan skeptisisme mahasiswa bahwa proyek pelembagaan baru hanya akan menyerap alokasi anggaran secara tidak efisien ketimbang menyelesaikan akar masalah komersialisasi pendidikan, sehingga pemerintah direkomendasikan untuk menangguhkan pendirian URI dan meredistribusikan alokasi anggarannya untuk menambah subsidi UKT (Uang Kuliah Tunggal) di PTN yang sudah ada serta meningkatkan dana abadi riset perguruan tinggi nasional.

PSKP
Pusat Studi Kebijakan Publik

Kesimpulan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi dan pemetaan persepsi dari 828 responden mahasiswa lintas provinsi di Indonesia, pelaksanaan dua tahun program prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan dinamika penilaian yang beragam dengan kecenderungan penilaian umum berada pada level moderat dan evaluatif. Gambaran ini mencerminkan adanya variasi persepsi publik antara kelompok yang memberikan catatan kritis terhadap eksekusi kebijakan di lapangan dengan kelompok yang memberikan dukungan penuh, sehingga menggarisbawahi pentingnya penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program di sisa masa jabatan.

Di tengah dinamika tersebut, program-program yang berfokus pada pemenuhan layanan dasar universal *(Universal Basic Services)* dan berdampak langsung pada kebutuhan fisik serta pendidikan masyarakat meraih tingkat kepuasan dan apresiasi tertinggi. Program Cek Kesehatan Gratis berhasil mencatatkan persepsi kebermanfaatan paling kuat sekaligus tingkat ketidaktepatan sasaran paling rendah, yang kemudian disusul oleh capaian positif pada program Digitalisasi Pendidikan, Sekolah Rakyat, serta Perbaikan Sekolah melalui Revitalisasi Satuan Pendidikan. Keberhasilan program-program ini menegaskan bahwa publik terdidik memberikan legitimasi sosial yang sangat kuat terhadap strategi optimalisasi aset yang ada dan bantuan sosial langsung yang inklusif serta berkeadilan.

Sebaliknya, program-program unggulan bernilai anggaran besar yang menggunakan skema pelayanan umum menghadapi tantangan dalam hal persepsi ketepatan sasaran *(targeting accuracy)*. Meskipun kebermanfaatan program Makan Bergizi Gratis diakui secara prinsip oleh mayoritas responden, skema penyaluran yang bersifat seragam dinilai memicu risiko ketidaktepatan sasaran dan pemborosan anggaran. Tantangan serupa juga terlihat pada program Koperasi Desa Merah Putih yang dipersepsikan rentan terhadap penguasaan elit lokal di tingkat desa ketimbang memberdayakan masyarakat di tingkat tapak.

Selain itu, evaluasi ini memotret perlunya penataan ulang terhadap kebijakan yang bersifat sektoral, penyesuaian insentif pejabat publik, maupun proyek fisik berskala besar. Kebijakan seperti Kenaikan Gaji Hakim, pengembangan Komponen Cadangan TNI, pendirian Universitas Republik Indonesia, hingga program pembangunan fisik bernilai tinggi cenderung dipersepsikan berjarak dari kebutuhan mendesak masyarakat luas. Hasil temuan ini menegaskan pentingnya efisiensi alokasi anggaran belanja negara agar lebih terintegrasi dan berfokus pada penguatan kapasitas pelayanan publik mendesak yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk meningkatkan efektivitas kinerja, memperkuat tata kelola, dan memastikan kebermanfaatan program prioritas secara merata, berikut adalah rekomendasi strategis yang diajukan kepada pemerintah pusat dan daerah:

Optimalisasi dan Penguatan Program Layanan Dasar Universal

a. Perluasan Cek Kesehatan Gratis

Menjadikan program ini sebagai pilar utama belanja sosial dengan memperluas kapasitas operasional hingga ke tingkat Puskesmas dan Posyandu, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

b. Prioritas Revitalisasi Sekolah Existing

Memfokuskan alokasi anggaran fungsi pendidikan pada pemugaran dan penyempurnaan fasilitas sekolah/kampus yang sudah ada ketimbang memperbesar proyek fisik kelembagaan baru, guna menjamin pemerataan kualitas pendidikan nasional.

c. Pemerataan Infrastruktur Digital

Memfokuskan program Digitalisasi Pendidikan pada penyediaan jaringan dan perangkat belajar di sekolah-sekolah pelosok untuk memperkecil jurang ketimpangan digital *(digital divide)*.

Restrukturisasi dan Penajaman Target Program Unggulan

a. Penajaman Sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Mengubah pendekatan penyaluran dari skema universal menjadi *geographical & socio-economic targeting* yang diprioritaskan bagi wilayah dengan angka kemiskinan tinggi dan krisis stunting, guna mencegah pemborosan anggaran *(inclusion error).*

b. Evaluasi Kelembagaan Desa (KDKMP)

Memfokuskan penguatan ekonomi desa pada optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah aktif dan pemberdayaan komunitas lokal, ketimbang pembentukan wadah kelembagaan baru secara *top-down.*

Penataan Prioritas Anggaran dan Efisiensi Sektoral

a. Penyediaan Hunian Berbasis Aksesibilitas

Meredistribusi fokus kebijakan pembangunan rumah dari sekadar pencapaian kuantitatif menuju penyediaan hunian sewa terjangkau *(public housing)* yang terintegrasi dengan jaringan transportasi publik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pekerja muda.

b. Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja (KPI)

Mengaitkan penyesuaian kesejahteraan aparatur/penegak hukum secara ketat dengan Indikator Kinerja Utama (KPI), peningkatan integritas, dan transparansi tata kelola peradilan.

c. Pemberdayaan Sektor Pertanian dan Pesisir

Mengalihkan alokasi proyek skala besar ke arah perbaikan infrastruktur irigasi lokal, jaminan ketersediaan pupuk/subsidi bagi petani gurem, serta penguatan ekosistem rantai dingin *(cold chain)* dan BBM bersubsidi bagi nelayan tradisional.

PSKP
Pusat Studi Kebijakan Publik

Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Ahmad Dahlan (PSKP UAD) dibentuk 2025 sebagai lembaga yang berfokus pada penelitian, dan pengembangan kebijakan publik yang berdampak. PSKP UAD berupaya dengan semangat partisipasi semesta untuk melakukan penguatan kebijakan berbasis riset ilmiah yang berdampak pada perubahan sosial dan pembangunan berkelanjutan (SDG's).

pskp.uad.ac.id pskp@uad.ac.id

Kampus 2 Unit B UAD – Jl. Pramuka no 5F, Pandeyan, Kec. Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166